A logo on a black background

Description automatically generated

**SKRIPSI**

# PENGARUH INKLUSIF SOSIALTERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023

Oleh :

**MELISA TIKA SEPTIANI**

**NPM. 2120600038**

Diajukan Kepada:

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2024**

A logo on a black background

Description automatically generated

**SKRIPSI**

# PENGARUH INKLUSIF SOSIALTERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka penyelesaian studi strata 1 (S1) untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal

**Oleh :**

**MELISA TIKA SEPTIANI**

**NPM. 2120600038**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

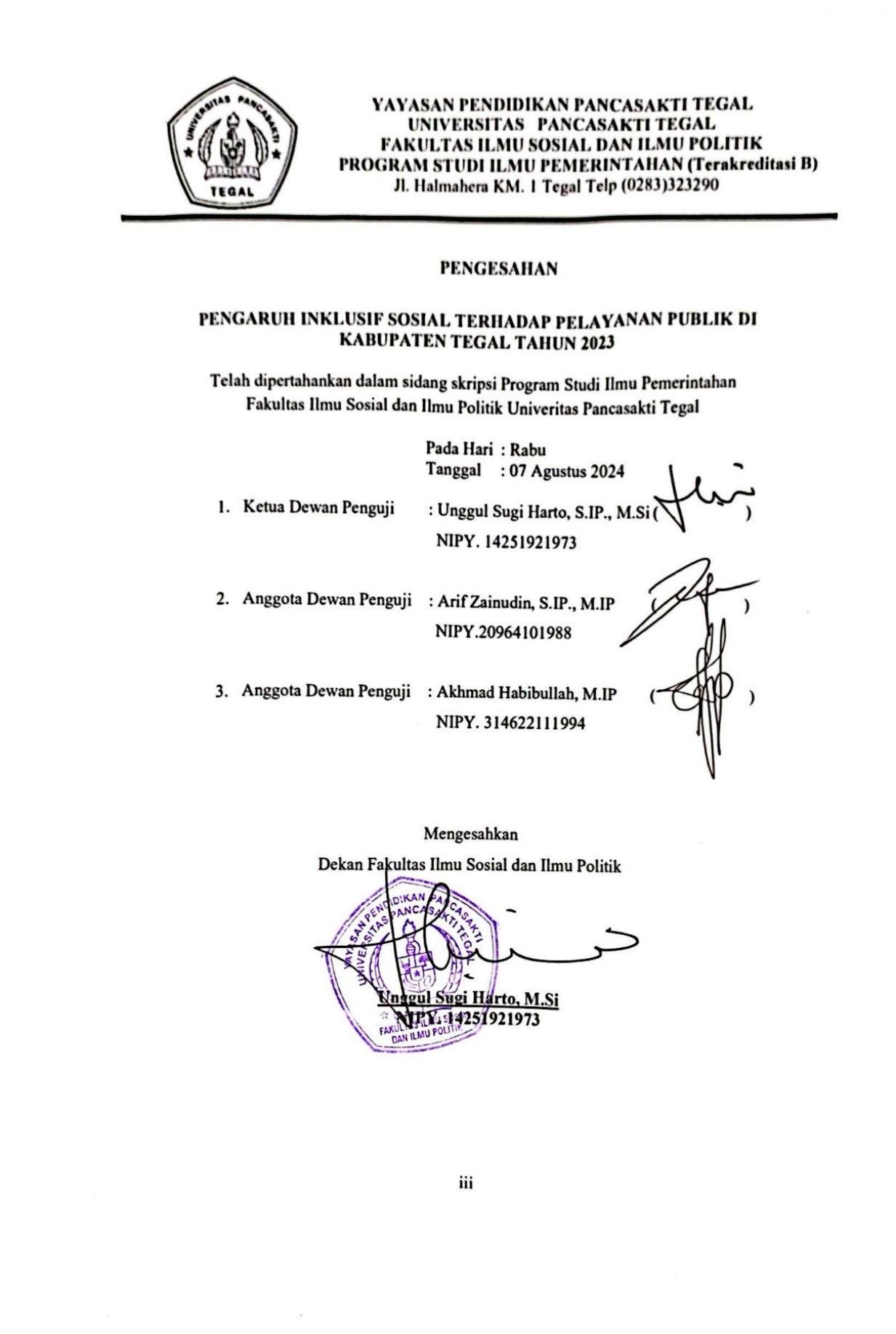
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2024**

# 



****

# MOTTO

**“Sembilan bulan ibuku merakit tubuhku untuk menjadi mesin penghancur badai, maka tak pantas aku tumbang hanya karena mulut seseorang”**

# PERSEMBAHAN

Segala puja dan puji syukur kepada tuhan yang Maha Esa dan atas dukungan serta doa dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya ucapkan rasa syukur serta terimakasih saya kepada Allah SWT, karena hanya atas izin dan karunia-Nya skripsi ini dapat dibuat dan diselesaikan pada waktunya.

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Allah SWT sebagai rasa syukur atas nikmat dan karunianya, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan penuh hikmat, serta diberikan kekuatan untuk menghadapi cobaan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Cinta pertamaku, Bapak Herudin. Beliau memang tidak pernah merasakan bagaimana rasanya bangku kuliah, tetapi beliau dapat memberikan motivasi dan semangat sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai dengan sarjana.
3. Pintu surgaku, Ibu Nurul Indrawati, S.Pd. Beliau sangat bereparan penting dalam menyelesaikan program studi penulis, beliau mampu memberikan motivasi, semangat, serta do’a yang selalu beliau berikan sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai dengan sarjana.
4. Kepada pemilik nama Deo Nursandi terimakasih atas segala bantuan, waktu, support, motivasi, dan kebaikan yang diberikan kepada penulis disaat masa-masa mengerjakan skripsi ini. Terimakasih telah menjadi salah satu orang terpenting dalam bagian hidup saya. Serta terimakasih selalu mau mendengar keluh kesah penulis.
5. Terimakasih kepada Bapak Darsono dan Ibu Nurjanah yang sudah menjadi orang tua kedua bagi penulis, serta selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Teruntuk Nana Farikha, Firda Dwi Amalia Safitri, Nidaun Nia’matul Amimah, Riza Yulianti, dan Bella Ayu Mei Putri terimakasih banyak selama masa pengerjakan skripsi sudah selalu menemani dan memberikan semangat serta dukungan selama masa penyusunan skripsi ini.
7. Dan yang terakhir, kepada perempuan sederhana namun sulit dimengerti, sang penulis skripsi ini, diri saya sendiri. Melisa Tika Septiani, seseorang perempuan yang bulan September nanti akan berusia 22 tahun, namun saat pengerjaan skripsi ini terkadang seperti anak kecil. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini dalam melewati berbagai rintangan dalam hidup yang tidak tertebak adanya. Teruslah berbahagia Melisa, dimana pun kamu berada kamu harus bahagia.

# KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penlis panjatkan kepada Allah SWT atas seluruh rahmat dan hidayah-Nya yang telah menolong saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam terlimpah curahkan kepada baginda tercinta Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul *“Pengaruh Inklusif Sosial Terhadap Model Pelayanan Publik Di Kabuapten Tegal Tahun 2023".* Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarja Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat tersusun dengan baik atas dorongan, semangat, bantuan, pengajaran, bimbingan dan do’a dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Taufiqulloh, M.Hum, selaku rektor Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal.
2. Bapak Unggul Sugi Harto, S.IP., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan selaku ketua dewan penguji yang telah memberikan saran dan masukan untuk kebaikan skripsi ini.
3. Bapak Arif Zainudin, S.IP., M.IP, selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar memberi bimbingan dan membantu dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Akhmad Habibullah, M.IP, selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan dan dosen pembimbing yang telah memberikan motivasi, semangat, arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Staf Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan pelayanan yang baik dan membantu mahasiswa.
6. Semua pihak yang telah membantu sehingga terselesaikan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala hal bantuan dan bimbingan yang telah diberikan menjadi amal kebaikan dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Dan penulis menyadari bahwa didalam penyusunan skripsi ini masih ada yang salah satu perlu diperbaiki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca kepada penulis agar karya ini dapat bermanfaat.

Tegal, 07 Agustus 2024

**Melisa Tika Septiani**

**NPM. 2120600038**

# ABSTRAK

**Melisa Tika Septiani, 2024, Pengaruh Inklusif Sosial Terhadap Pelayanan Publik Di Kabupaten Tegal tahun 2023**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui system function dalam pelayanan disabilitas di Kabupaten Tegal, menganalisis sebarapa pengaruh service outcome pelayanan pada prodak pelayanan disabilitas, dan mengetahui system funcuion dan service outcome dapat diwujdukan pada pelayanan inklusif di Kabupaten Tegal. Variabel independen dalam penelitian ini meliputi, keterbukaan, aksesbilitas, infrastruktur, dan kepedulian pemerintah. Variabel dependen adalah pelayanan yang diakses oleh disabilitas. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari data kuesioner. Data uji sebanyak 100 respoden. Dari penelitian yang sudah dilakukan dan pengolahan data menggunakan aplikasi *SmartPLS* dengan menyebarkan kuesioner didapatkan bawah keterbukaan, aksesbilitas, infrastruktur, dan kepedulian pemerintah terdapat satu indikator yang memberikan variasi wajib pada pelayanan inklusif yaitu infrastruktur.

**Kata Kunci : Keterbukaan, Aksesbilitas, Infrastruktur, Kepedulian Pemerintah, Pelayanan.**

# *ABSTRACT*

***Melisa Tika Septiani, 2024, The Influence of Social Inclusion on Community Services in Tegal Regency in 2023***

*This study aims to determine the system function in disability services in Tegal Regency, analyze the influence of service outcomes on disability service products, and find out how the system of function and service outcomes can be applied to inclusive services in Tegal Regency. The independent variables in this study include, openness, accessibility, infrastructure, and government concern. The dependent variable is the servant who is accessed by the disabled. The data used is primary data obtained from questionnaire data. The test data was 100 respoden. From the research that has been carried out and data processing using the SmartPLS application by distributing questionnaires, it is obtained that under openness, accessibility, infrastructure, and government concern, there is one indicator that provides mandatory variations in inclusive services, namely infrastructure.*

***Keywords: Openness, Accessibility, Infrastructure, Government Concern, Service.***

# **DAFTAR** ISI

[HALAMAN JUDUL i](#_Toc173869935)

[PERNYATAAN i](#_Toc173869936)i

[HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ii](#_Toc173869937)i

[PENGESAHAN iii](#_Toc173869938)v

[MOTTO iv](#_Toc173869939)

[PERSEMBAHAN v](#_Toc173869940)i

[KATA PENGANTAR vii](#_Toc173869941)i

[ABSTRAK ix](#_Toc173869942)

[*ABSTRACT* x](#_Toc173869943)i

[DAFTAR ISI xi](#_Toc173869944)i

[DAFTAR TABEL xiii](#_Toc173869945)

[DAFTAR GAMBAR xiv](#_Toc173869946)

[DAFTAR GRAFIK xv](#_Toc173869947)

[BAB I 1](#_Toc173869948)

[PENDAHULUAN 1](#_Toc173869949)

[I.1. LATAR BELAKANG 1](#_Toc173869950)

[I.2. RUMUSAN MASALAH 10](#_Toc173869951)

[I.3. TUJUAN PENELITIAN 10](#_Toc173869952)

[I.4. MANFAAT PENELITIAN 10](#_Toc173869953)

[BAB II 12](#_Toc173869954)

[TINJAUAN PUSTAKA 12](#_Toc173869955)

[II.1. PENELITIAN TERDAHULU 12](#_Toc173869956)

[II.2. LANDASAN TEORI 17](#_Toc173869957)

[II.3. HIPOTESIS PENELITIAN 44](#_Toc173869958)

[II.4. DEFINISI KONSEPSIONAL 44](#_Toc173869959)

[II.5. DEFINISI OPERASIONAL 45](#_Toc173869960)

[II.6. ALUR PIKIR 47](#_Toc173869961)

[BAB III 48](#_Toc173869962)

[METODE PENELITIAN 48](#_Toc173869963)

[III.1. PENDEKATAN PENELITIAN 48](#_Toc173869964)

[III.2. JENIS DAN TIPE PENELITIAN 48](#_Toc173869965)

[III.3. POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN 49](#_Toc173869966)

[III.5. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 63](#_Toc173869967)

[III.6. TEKNIK ANALISIS DATA 64](#_Toc173869968)

[3.6.1 Validitas Dan Reabilitas Data 64](#_Toc173869969)

[BAB IV 70](#_Toc173869970)

[DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN 70](#_Toc173869971)

[IV.1 Demografi Wilayah Kabupaten Tegal 71](#_Toc173869972)

[IV.2. Mata Pencaharian Masyarakat Kabupaten Tegal 77](#_Toc173869973)

[IV.3. Sosial Budaya Masyarakat Kabupaten Tegal 78](#_Toc173869974)

[IV.4. Profil Kantor Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 79](#_Toc173869975)

[IV.5. Visi dan Misi Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 81](#_Toc173869976)

[IV.6. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial, Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 83](#_Toc173869977)

[IV.7. Pelayanan Umum di Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 85](#_Toc173869978)

[IV.8. Stuktur Organisasi di Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 87](#_Toc173869979)

[BAB V 91](#_Toc173869980)

[HASIL DAN PEMBAHASAN 91](#_Toc173869981)

[V.1. Profil Responden 91](#_Toc173869982)

[V.2. Hasil Uji Validitas dan Relibilitas 93](#_Toc173869983)

[BAB VI 109](#_Toc173869984)

[PENUTUP 109](#_Toc173869985)

[VI.1. Kesimpulan 109](#_Toc173869986)

[VI.2. Saran 109](#_Toc173869987)

[DAFTAR PUSTAKA 111](#_Toc173869988)

[LAMPIRAN 115](#_Toc173869989)

# DAFTAR TABEL

[Tabel 1.1 Jumlah Penyandang Disabilitas Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 6](#_Toc173865160)

[Tabel 2.2 Ragam Penyandang Disabilitas 7](#_Toc173865161)

[Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 12](#_Toc173865162)

[Tabel 2.2 Definisi Operasional 46](#_Toc173865163)

[Tabel 2.3 Alur Pikir 47](#_Toc173865164)

[Tabel 4.1 Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Tegal 71](#_Toc173865165)

[Tabel 5.1 Hasil Uji Validitas Inklusif 94](#_Toc173865166)

[Tabel 5.2 Hasil Uji Validitas Pelayanan 95](#_Toc173865167)

[Tabel 5.3 Hasil Uji Reliabilitas Menggunakan AVE 96](#_Toc173865168)

[Tabel 5.4 Construct Reliability and Validity 102](#_Toc173865169)

[Tabel 5.5 Discriminant Validity versi Heterotrait monotrait ratio (HTMT) 103](#_Toc173865170)

[Tabel 5.6 Hasil dan Kesimpulan Pengujian Hipotesis Dan P-value dengan Gambar Model 108](#_Toc173865171)

# DAFTAR GAMBAR

[Gambar 4.1 Peta Kabupaten Tegal 70](#_Toc173864339)

[Gambar 5.1 Hasil Uji Indikator variable X1 Keterbukaan dengan Y Pelayanan Inklusif 98](#_Toc173864340)

[Gambar 5.2 Hasil Uji Indikator variable X2 Aksesbilitas dengan Y Pelayanan Inklusif 99](#_Toc173864341)

[Gambar 5.3 Hasil Uji Indikator variable X3 Infrastruktur dengan Y Pelayanan Inklusif 100](#_Toc173864342)

[Gambar 5.4 Hasil Uji Indikator variable X4 Kepedulian Pemerintah dengan Y Pelayanan Inklusif 101](#_Toc173864343)

[Gambar 5.5 Hasil Model Pelayanan Inklusif 105](#_Toc173864344)

[Gambar 5.6 Hasil Model Pelayanan Inklusif 106](#_Toc173864345)

[Gambar 5.7 Hasil P-value 107](#_Toc173864346)

[Gambar 5.8 Hasil Pengujian Hipotesis 108](#_Toc173864347)

# DAFTAR GRAFIK

[Grafik 1.1 Jumlah Penyandang Disabilitas di Indonesia 2](#_Toc173865872)

[Grafik 2.2 Penyandang Disabilitas Berdasarkan Jenis-Jenisnya di Indonesia 3](#_Toc173865873)

[Grafik 3.3 Tingkat Keparahan Jenis-Jenis Disabilitas di Indonesia 4](#_Toc173865874)

[Grafik 5.1 Jenis Kelamin Responden 91](#_Toc173865875)

[Grafik 5.2 Jenis Disabilitas Responden 92](#_Toc173865876)

[Grafik 5.3 Hasil Uji Relialibilitas Menggunakan Ave 97](#_Toc173865877)

[Grafik 5.4 Construct Reliability and Validity 103](#_Toc173865878)

[Grafik 5.5 Discriminant Validity versi Heterotrait monotrait ratio (HTMT) 104](#_Toc173865879)

# BAB I

# PENDAHULUAN

## LATAR BELAKANG

Pelayanan menurut (Moenir, 1995) proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Menurut (Helwig et al., 2009) tujuan dari pelayanan publik adalah memuaskan dan memenuhi keinginan atau harapan penerima pelayanan. Kepuasan tersebut di capai dari pelayanan yang prima dan pelayanan yang transparansi, pelayanan yang bersifat terbuka sehingga dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan pelayanan tersebut dan tentunya mudah di pahami dan di mengerti oleh masyarakat umum dan masyarakat disabilitas.

Menurut (Zickuhr, 2016) Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Hak penyandang disabilitas lebih di utamakan dari masyarakat umum, karena disabilitas digolongkan sebagai salah satu kelompok rentan, kelompok rentan yakni kelompok yang paling sering menerima perlakuan diskriminasi dan hak-haknya sering tidak terpenuhi (Ningsih, 2022)

**Grafik 1.1 Jumlah Penyandang Disabilitas di Indonesia**

Sumber : Bappenas

Pada grafik 1.1 terdapat 2 jenis disabilitas, yaitu PD dan PMD. PD merupakan kepanjangan dari Penyandang Disabilitas dan PMD merupakan kepanjangan dari Penyandang Multi Disabilitas. PD merupakan penyandang disabiltas yang tunggal, tunggal dalam artian bahwa hanya memiliki 1 jenis disabilitas, sedangkan PMD merupakan penyandang multi disabilitas yang artinya penyandang disabilitas mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas yang diderita.

Grafik 1.1 terdapat 3 provinsi dengan jumlah PD tertinggi yaitu Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Barat, sedangkan pada PMD 3 provinsi tertinggi jumlahnya yaitu Sumtra Utara, Bali, dan Jawa Tengah. Pemerintah Indonesia tentunya dalam merancang sebuah pelayanan publik harus melihat kondisi masyarakatnya. Terutama untuk provinsi dengan jumlah masyarakat PMD yang tinggi, jumlah PMD yang tinggi sangat membutuhkan perhatian khusus yang lebih banyak karena merupaka kelompok yang cukup rentan.

**Grafik 1.2 Penyandang Disabilitas Berdasarkan Jenis-Jenisnya di Indonesia**

Sumber : Bappenas

Pada grafik 1.2 penyandang disabilitas berdasarkan jenis-jenisnya di Indonesia terdapat 8 jenis yang disabilitas di Indonesia, jumlah terbanyak penyandang disabilitas yaitu penyandang disabilitas dengan orang-orang gangguan melihat dengan jumlah 63,7%, yang kedua ada orang-orang dengan gangguan berjalan dengan jumlah 38,3%, dan yang ketiga ada orang-orang dengan gangguan konsentrasi atau gangguan ingatan dengan jumlah 29,7% dan jumlah disabilitas paling sedikit yaitu gangguan perilaku atau emosi dengan jumlah 13,5%.

Dengan adanya orang-orang gangguan melihat seharusnya dinas-dinas menyidiakan pelayanan khusus untuk orang yang memiliki gangguan melihat, seperti menyiapkan pelayanan yang menggunakan komputer bicara, kertas braille. Dinas-dinas harus menyediakan paling tidak satu alat bantu untuk satu ragam penyandang disabilitas. Sehinngga para penyandang disabilitas juga mendapatkan pelayanan meskipun dengan cara yang berbeda atau khusus.

**Grafik 1.3 Tingkat Keparahan Jenis-Jenis Disabilitas di Indonesia**

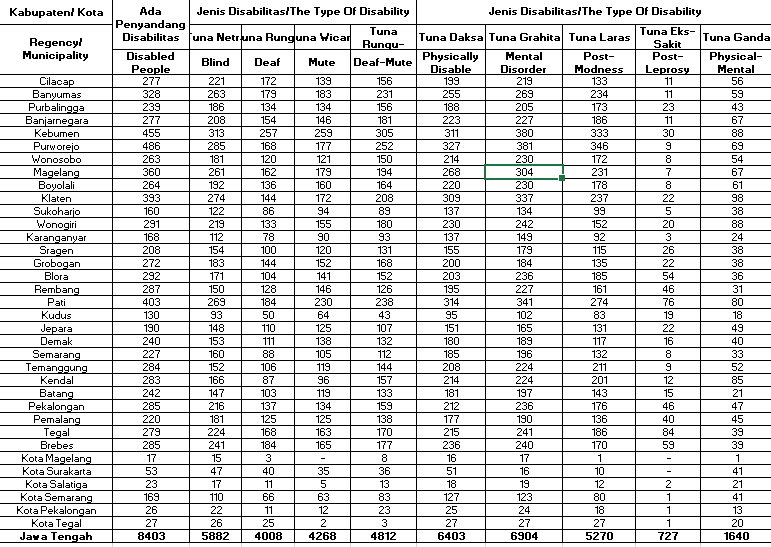
Sumber : Bappenas

Pada grafik 1.3 orang dengan gangguan melihat dengan tingkat keparahan yang ringan merupakan jumlah terbanyak dibandingkan dengan gangguan lainnya dengan tingkat keparahan yang sama, yang terbanyak kedua adalah orang dengan gangguan mendengar dengan tingkat keparahan ringan. Untuk tingkat keparahan sedang yang terbanyak adalah komunikasi, komunikasi atau disabilitas intelektual. Dan untuk tingkat keparahan yang parah terbanyak adalah mengurus diri sendiri, orang dengan gangguan disabilitas mengurus diri sendiri sangat membutuhkan peranan orang lain dalam menangani kebutuhan penyandang disabilitas tersebut. Penyandang disabilitas tersebut tidak dapat melakukan kegiatan seperti penyandang disabilitas lainnya.

Dari beberapa ragam disabilitas diatas membuktikan bahwa mereka membutuhkan pelayanan khusus, seperti pelayanan inklusif. Pelayanan inklusif adalah pelayanan yang dapat diakses oleh disabilitas seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, mendapatkan nutrisi, perlindungan sosial, dan terpenuhi hak-hak lainnya, sehingga disabilitas dapat mandiri, menjadi Sumber Daya Manusia yang unggul, bahkan dapat berkontribusi unuk pembangunan bangsa dan negara.

Dalam pelayanan kesehatan akan mendapatkan pelayanan yang khusus saat mereka mendatangi fasilitas kesehatan. Pelayanan tersebut akan mereka dapatkan ketika mereka berobat yaitu dengan mereka mendapatkan antrian khusus dan pelayanan yang khusus. Pada fasilitas kesehatan pun akan menyediakan alat bantu agar mereka dapat memperoleh pelayanan tersebut.

**Tabel 1.1 Jumlah Penyandang Disabilitas Kabupaten/Kota di Jawa Tengah**



Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal berupaya memberikan pelayanan publik yang baik untuk masyarakatnya, baik masyarakat umum maupun masyarakat yang berkebutuhan khusus (penyandang disabilitas), dengan adanya perbedaan ini menjadikan tugas Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakaatnya. Untuk mewujudkan keadilan sosial, Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2021 tentang “Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas”. Dengan adanya Perda tersebut diharapkan dapat memberikan pelayanan publik inklusif bagi Penyang Disabilitas sesuai dengan aturan yang berlaku pada Perda tersebut.

Mengenai Penyandang Disabilitas di Kabupaten Tegal khususnya dari 18 kecamatan, 281 desa, dan 6 kelurahan terdapat sekitar 3.910 Jiwa Penyandang Disabilitas. Berikut data jenis masyarakat Penyandang Disabilitas di Kabupaten Tegal:

**Tabel 1.2 Ragam Penyandang Disabilitas**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK) Fisik** | **L** | **P** | **JUMLAH** |
| * Anak Dengan Disabilitas Fisik > Tubuh (Tuna Daksa) | 133 | 108 | 241 |
| Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK) Sensorik |  |  |  |
| * Anak Dengan Disabilitas Sensorik > Mata (Tuna Netra) | 19 | 17 | 36 |
| * Anak Dengan Disabilitas Sensorik > Tuli (Tuna Rungu) | 20 | 13 | 33 |
| * Anak Dengan Disabilitas Sensorik > Bisu (Tuna Wicara) | 46 | 34 | 80 |
| * Anak Dengan Disabilitas Sensorik > Rungu/Wicara (Bisu Tuli) | 13 | 16 | 29 |
| Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK) Mental |  |  |  |
| * Anak Dengan Disabilita Mental > Mantan Penderita Gangguan Jiwa | 3 | 2 | 5 |
| * Anak Dengan Disabilitas Mental > Gangguan Jiwa | 16 | 18 | 34 |
| * Anak Dengan Disabilitas Mental > Autisme | 15 | 7 | 22 |
| * Anak Dengan Disabilitas Mental > Psikososial | 1 | 0 | 1 |
| Anak Dengan Disabilitas Intelektual |  |  |  |
| * Anak Dengan Disabiltas Intelektual > Gangguan Retardasi | 69 | 45 | 114 |
| * Anak Dengan Disabilitas Intelektual > Down Syndrome | 17 | 9 | 26 |
| * Anak Dengan Disabilitas Intelektual > Tuna Grahita | 5 | 3 | 8 |
| Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ganda |  |  |  |
| * Anak Dengan Disabilitas Ganda > Netra & Fisik | 2 | 3 | 5 |
| * Anak Dengan Disabilitas Ganda > Netra, Rungu & Wicara | 2 | 0 | 2 |
| * Anak Dengan Disabilitas Ganda > Fisik & Mental | 38 | 22 | 60 |
| * Anak Dengan Disabilitas Ganda > Rungu, wicara & fisik | 5 | 6 | 11 |
| * Anak Dengan Disabiltas Ganda > Netra, Rungu, Wicara & Fisik | 21 | 16 | 37 |
| Penyandang Disabilitas Fisik (Dewasa) |  |  |  |
| * Penyandang Disabilitas Fisik > Tubuh (Tuna Daksa) | 555 | 359 | 914 |
| Penyandang Disabilitas Sensorik |  |  |  |
| * Penyandang Disabilitas Sensorik > Mata (Tuna Netra) | 229 | 219 | 448 |
| * Penyandang Disabilitas Sensorik > Tuli (Tuna Rungu) | 236 | 227 | 463 |
| * Penyandang Disabilitas Sensorik > Bisu (Tuna Wicara) | 86 | 75 | 161 |
| * Penyandang Disabilitas Sensorik > Rungu/Wicara (Bisu Tuli) | 72 | 51 | 123 |
| Penyandang Disabiitas Mental |  |  |  |
| * Penyandang Disabilitas Mental > Mantan Penderita Gangguan Jiwa | 108 | 62 | 170 |
| * Penyandang Disabilitas Mental > Gangguan Jiwa | 79 | 54 | 133 |
| * Penyandang Disabilitas Mental > Laras | 0 | 1 | 1 |
| * Penyandang Disabilitas Mental > Autisme | 5 | 1 | 6 |
| * Penyandang Disabilitas Mental > Skyzofrenia | 1 | 0 | 1 |
| Penyandang Disabilitas Intelektual |  |  |  |
| * Penyandang Disabilitas Intelektual > Gangguan Reterdasi | 205 | 144 | 349 |
| * Penyandang Disabilitas Intelektual > Down Syndrome | 10 | 7 | 17 |
| * Penyandnag Disabilitas Intelektual > Tuna Grahita | 8 | 11 | 19 |
| Penyandang Disabilitas Ganda |  |  |  |
| * Penyandang Disabilitas Ganda > Netra & Fisik | 22 | 23 | 45 |
| * Penyandang Disabilitas Ganda > Netra, Rungu, Wicara & Fisik | 30 | 32 | 62 |
| * Penyandang Disabilitas Ganda > Netra, rungu & wicara | 15 | 17 | 32 |
| * Penyandang Disabilitas Ganda > rungu, wiacara & fisik | 17 | 7 | 24 |
| * Penyandang Disabilitas Ganda > Mental & Fisik | 116 | 82 | 198 |
| **JUMLAH** | 2.219 | 1.691 | 3.910 |

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Tegal 2023

Banyak orang yang memandang para penyandang disabilitas itu cacat, dan memandang remeh pada para penyandang disabilitas. Padahal para penyandang disabilitas harus mendapatkan hak yang adil dan setara dengan masyarakat umum atau bahkan mendapatkan ke istimewaan pada pelayanannya. Tetapi ada pelayanan yang tidak mengistimewakan penyandang disabilitas, dan para penyang disabilitas tidak mendapatkan hak yang seharusnya ia dapatkan di pelayanan tersebut.

## I.2. RUMUSAN MASALAH

1. Seberapa besar pengaruh system function dalam pelayanan disabilitas di Kabupaten Tegal

2. Seberapa besar pengaruh service outcome pelayanan pada prodak pelayanan disabilitas

3. Apakah system function dan service outcome dapat diwujudkan pada pelayanan inklusif di Kabupaten Tegal

## I.3. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini:

1. Ingin mengetahui system function dalam pelayanan disabilitas di Kabupaten Tegal
2. Menganalisis pengaruh service outcome pelayanan pada prodak pelayanan disabilitas
3. Ingin mengetahui system function dan service outcome dapat diwujudkan pada pelayanan inklusif di Kabupaten Tegal

## I.4. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat secara Teoritis
2. Mengembangkan pelayanan disabilitas terutama yang berorientasi pada pelayanan publik.
3. Mengetahui kesesuain konsep pelayanan inklusif dengan pelayanan publik di Kabupaten Tegal
4. Manfaat secara praktis
5. Bagi pelayanan publik, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melaksanakan pelayanan inklusif sehingga pelayanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan setiap penyandang disabilitas di Kabupaten Tegal.
6. Bagi peneliti selanjutnya, mengatahui sikap pelayanan publik dalam melaksanakan pelayanan inklusif, sehingga dapat memberikan informasi dalam melakukan penelitian lebih lanjut.

# 

# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## II.1. PENELITIAN TERDAHULU

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Penulis | Judul | Metode | Hasil Penelitian | Perbedaan |
| Apdita Suci Nurani; Soesilo Zauhar, Prof,Dr,MS; Choirul Saleh, Dr, M.Si  (2015) | Responsivitas Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Dalam Perspektif New Public Service | Penelitian ini merupakan penelitian deskiptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan tiga sumber data yaitu pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. | Responsivitas memiliki persamaan arti dengan daya tanggap. Perspektif sebelumnya yang dianggap memilki kelemahan, sehingga muncul perspektif baru yaitu new public service. Tujuan program tersebut tetap melayani masyarakat, agar masyarakat memiliki akses, pilihan, informasi, perbaikan dan keterwakilan | Perbedaan penelitian Apdita Suci Nurani dkk dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada respon pemerintah terhadap pendidikan saja, sedangkan pada penelitian saya adalah respon pemerintah terhadapp pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. |
| Arief Rachmat Fauzi, Syahrifan Patadjenu, Ratih Utami, & Dodit Rachmadi Slamet  (2023) | Peningkatan Layanan Kependudukan dan Catatan Sipil yang Inklusif melalui Optimalisasi Fasilitas Penyandang Disabilitas di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanggerang Selatan | Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan diuraikan secara deskriptif sehingga mampu memberikan informasi yang lebih luas, sehingga dapat direkomendasikan kebijakan yang sekiranya tepat untuk menyelesaikan masalah yang sedangdicarikan solusi pemecahannya. | Terdapat permasalahan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanggerang Selatan dalam penerapam fasilitas khususnya sarana dan prasaraa bagi penyandang disabilitas. Seperti belum tersedia sarana dan prasarana pendukung seperti tangga, pegangan untuk pengguna kursi roda, toilet khusus, jalur pemandu yang disalahgunakan, dan belum tersedia rambu tempat parkir khusus penyandang disabilitas. | Perbedaan penelitian Arief Rachmat Fauzi dkk dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada peraturan daerah masing-masing. Penelitian Arief Rachmat Fauzi dkk berpedoman pada Perda Kota Tanggerang Selatan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Disabilitas. Sedangkan pada peneliitian yang akan saya teliti berpedoman pada Perda Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. |
| Asrini  (2021) | Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone | Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif, dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif. | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone sepenuhnya sadar akan sumber daya sarana dan prasarana yang diperlukan oleh penyandang disabilitas dan wujud perhatian pemerintah dalam rangka pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam aksesibilitas pelayanan publik seperti tersedianya kursi roda, jalur khusus kursi roda bagi penyandang disabilitas meskipun dari segi fasilitas yang belum cukup memadai. | Perbedaan penelitian Asrini dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada aksesibilitas pelayanan publik, sedangkan pada penelitian yang akan di teliti terletak pada pelayanan inklusif dalam bidang pelayanan di pemerintahan. |
| Aldilla Reyndha Masadhe; Sjamsiar Sjamsuddin; Fadillah Amin  (2021) | Manajemen Pelayanan Kampus Inklusif (Studi pada Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya) | Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi | Perencanaan dalam pelayanan PSLD UB (Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya) telah dilaksanakan dengan melakukan identifikasi kebutuhan pelayanan bagi mahasiswa difabel. PLSD UB telah dilakukan dengan menerapkan penjabaran tugas pokok dan fungsi serta tersusunan dan struktur organisasi disesuaikan dengan penempatan SDM | Perbedaan penelitian Aldilla Rayndha Masadhe dkk dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada segi layanan pendidikan yaitu di Universitas Brawijaya, sedangkan pada penelitian yang akan saya teliti adalah berfokus pada segi layanan pada bidang pemerintahan di Kabupaten Tegal |
| Randy Harfian Hamid  (2020) | Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Di Rumah Ibadah Dalam Tinjauan Pelayanan Publik Yang Inklusif (Studi Kasus Pelayanan Aksesibilitas Bagi Disabilitas di Masjid Raya Sumatera Barat) | Penelitian ini digunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif | Melayani penyandang disabilitas seperti penyandang tuna rungu dan tuna netra, pemprov juga diminta untuk menyediakan pemandu khusus dan fasilitas khusus. Pihak pemerintah provinsi sumatera barat memebrikan fasilitas sarana dan prasarana masjid raya, salah satu diantaranya yaitu menydiakan tenaga pengamanan dan kebersihan. Meskipun demikian masih ada jamaah yang menolak jamaah lain yang menggunakan kursi roda untuk beribadah | Perbedaan penelitian Randy Harfian Hamid dengan penelitian yang akan saya teliti terletak pada studi kasusnya, pada penelitian tersebut menelilti mengenai salah satu masjid di Sumatera Barat, sedangkan pada penelitian yang akan saya teliti terletak pada layanan pemerintahan agar fasilitas yang ada ramah akan disabilitas. |

Pada penelitian terdahulu banyak membahas pelayanan disabilitas. Pada pelayanan disabilitas pada penelitian di atas di terapkan pada pelayanan dalam pendidikan, pada pelayanan dinas kependudukan dan pencatatan sipil, dan pada pelayanan di tempat ibadah. Pertimbangan pada fokus penelitian ini disebabkan oleh tempat pelayanan yang tidak pasti ada pada setiap daerah menerapkan model pelayanan dalam mewujudkan keadilan pada pelayanan untuk masyarakat disabilitas.

## II.2. LANDASAN TEORI

**2.2.1 INKLUSI SOSIAL**

Konsep inklusi sosial pertama kali muncul di Prancis pada tahun 1970-an sebagai respon terhadap krisis kesejahteraan di negara-negara Eropa yang kemudian menyebar ke Eropa dan Inggris pada tahun 1980-an dan 1990-an. Konsep inklusi sosial kemudian mendapatkan perhatian sdan meluas pada tahun 1995 setelah dibahas dalam Konferensi World Summit For Social Development di Denmark (Susanti, 2019).

Inklusi sosial adalah proses yang memberikan daya pada individu atau kelompok tertentu untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan sosial baik seacara menyeluruh ataupun sebagian (Simarmata, 2017).

Pengertian inklusif digunakan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka, dan mengikut sertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik budaya dan lainnya (Assefa et al., 2021). Lingkungan inklusif adalah lingkungan sosial masyarakat yang terbuka, ramah meniadakan hambatan, dan menyenangkan karena setiap warga masyarakat tanpa terkecuali saling menghargai dan merangkul setiap perbedaan (Arboleda-Flórez & Stuart, 2012). Terbuka dalam konsep lingkungan inklusif, berarti semua orang yang tinggal, berada, dan beraktivitas dalam lingkungan keluarga, sekolah, ataupun masyarakat merasa aman dan nyaman mendapatkan hak dan melaksanakan kewajibannya (Blau, 2017)**.**

Empat Indikator Inklusi Sosial:

1. Keterbukaan

Perilaku pemerintah dalam menyebarkan informasi dan kebijakan kepada msyarakat dengan cara yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Kemudian sistem tersebut menjadi sebuah keharusan dalam menjamin sebuah keterbukaan menganai informasi dan upaya pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat yang membutuhkan.

1. Aksesibilitas

Aksesibilitas merupakan sebuah kemudahan yang disediakan bagi para difabel dalam mewujudkan sebuah kesamaan dalam kesempatan segala aspek kehidupan dan penghidupan sebagai suatu kemudahan dalam bergerak, menggunakan bangunnan gedung, memperhatikan kelancaran dan kelayakan, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang dapat memudahkan para difabel dalam mendapatkan sebuah pelayanan publik.

1. Infrastruktur

Fassilitas yang disediakan oleh pemerintah dalam mendukung suksesnya pelayanan yang diberikan infrastruktur ini dapat berupa sarana jalan, sistem informasi, alat bantu disabilitas, dan fasilitas penunnjang lainnya yang digunakan untuk memudahkan masyarakat disabilitas unntuk mendapatkan hak dalam pelayanan publik.

1. Kepedulian pemerintah

Kepedulian pemerintah merupakan salah satu perilaku dalam inklusi sosial yang diwajibkan peduli akan kondisi masyarakat yang minoritas, dengan memberikan haknya tanpa mengurangi sebuah nilai. Biasanya dikenal dengan sebutan *care management system* yang diterapkan pada pemerintah.

UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa wujud inklusi sosial dalam UU Pemerintah Daerah terlibat dalam bentuk kewajiban pemerintah dan hak masyarakat. Kewajiban pemerintah tampak pada ketentuan yang mengatur bahwa pelayanan dasar harus dapat diakses oleh publik. Akses atas informasi pelayanan publik juga harus disediakan. Adapun inklusi sosial dalam wujud hak masyarakat terdapat pada ketentuan mengenai partisipasi dalam semua tahapan pembangunan (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi).

UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam UU penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, wujud inklusi sosial terlihat dalam bentuk kewajiban pemerintah dan hak masyarakat. Undang-undang ini mengharuskan pemerintah atau penyelenggara negara untuk terbuka dan tidak diskriminatif dalam arti membeda-bedakan suku, agama, ras, dan antargolongan. Adapun masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara dan mendapatkan pelayanan dasar dan perlindungan hukum yang sama.

UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Inklusi sosial dalam UU Pelayanan Publik juga terlihat pada dua wujud, yaitu kewajiban pemerintah dan hak masyarakat. Inklusi sosial masuk dalam kewajiban pemerintah karena undang-undang ini memerintahkan agar pemerintah menyelenggarakan pelayanan publik seacara adil dan nondiskriminatif. Kewajiban lain pemerintah adalah memberikan perlakuan (fasilitas) khusus bagi masyarakat rentan dalam rangka menciptakan keadilan. Ditekankan bahwa pelayanan khusus tersebut tidak boleh menciptakan biaya tambahan. UU pelayanan publik mendorong inklusi sosial ditujukan kepada kelompok rentan, yang mencakup penyandang cacat, manual, wanita hamil, anak-anak, serta korban bencana alam dan bencana sosial.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Inklusi Sosial adalah upaya individu atau kelompok sebagai model utama dalam mencapai kualitas hidup yang ideal. Inklusi sosial mencangkup proses membangun hubungan sosial dan menghormati individu dan komunnitas, sehingga mereka dapat berpartisispasi penuh dalam pengambilan sebuah keputusan, serta memiliki akses dan control yang sama atas sumber daya manusianya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

**Sedangkan sebagai indikatornya mengacu pada UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dengan rincian sebagai berikut:**

1. Partisipasi Penuh

Partisipasi penuh artinya difabel dapat berperan serta secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga Kota. Dalam hal ini, indikatornya adalah keterlibatan difabel dan atau perwakilan difabel dalam perumusan kebijakan, mulai dari tingkat kelurahan hingga kota. Dalam pasal UU No. 8 Tahun 2016 disebutkan perlunya melibatkan kegiatan sosial, politik (pasal 75), budaya, dan seni (pasal 16) dan partisipasi dalam penanggulangan bencana (pasal 109).

1. Ketersediaan Layanan Hak/ Infrastruktur

Adanya upaya untuk menyediakan layanan, fasilitas, program, atau bangunan untuk memenuhi hak-hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan yang diamanatkan UU dan peraturan pemerintah. Indikatornya dapat mengacu ke UU No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menyebutkan secara rinci 22 hak dasar difabel (pasal 5), adanya unit layanan disabilitas dibidang pendidikan (pasal 42), dibidang ketenagakerjaan (pasal 55), dan adanya unit layanan informasi dan tindak cepat untuk difabel perempuan dan anak (pasal 125). Pemerintah dan umum juga wajjib menyediakan akomodasi yang layak (pasal 1-9, pasal 18-b). selain itu, pemerintah juga wajib menyediakan layanan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemeberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (pasal 90 dan 91).

1. Aksesibilitas

Artinya kemudahan bagi difabel untuk tanpa hambatan memperoleh manfaat dari sebuah bangunan, fasilitas, layanan, dan program. Secara rinci, Undang-undang menyebutkan hal-hal berikut sebagai indikator aksesibilitas ini. Pertama, aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik (pasal 18-a), aksesibilitas gedung yang memiliki fungsi: hunian,, keagamaan, usaha, sosial budaya, olahraga, dan khusus (pasal 98). Kedua, aksesbilitas saranadan prasarana umum, seperti jalan, jembatan, transportasi, informasi umum, layanan publik yang terjangkau dari segi jarak dan biaya, aksesibilitas dalam layanan peradilan (pasal 9). Ketiga, aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan memperoleh pendidikan politik (pasal 13). Demikian pula, keempat, hak aksesibilitas rumah ibadah (pasal 14), layanan kebudayaan dan pariwisata (pasal 85).

Untuk menjamin pemenuhan hak-hak aksesibilitas para difabel, UU menentukan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan audit terhadap ketersediaan fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada setiap bangunan gedung (pasal 99).

1. Sikap Inklusi

Sikap aparat pemerintahan dan masyarakat umum yang tidak diskriminatif, memberikan pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan atas hak-hak difabel. Sikap inklusi tidak disebutkan secara jelas di dalam undang-undang, tetapi dari teori yang disebutkan di awal, jelas bahwa attitude adalah salah satu penghambat dalam proses inklusi. Dalam kasus Kota Yogyakarta, hambatan attitudional yang tidak inklusif ini dapat dilihat dalam kasus fasilitas aksesibilitas yang tidak dihormati oleh baik pengambil kebijakan dan masyarakat. Guiding block di Malioboro, misalnya digunakan untuk parkir dan kaki lima. Mereka tidak tahu, mengabaikan, atau tidak mengerti bahwa guiding block adalah fasilitas inklusi difabel.

* + 1. **PELAYANAN PUBLIK**

Berawal dari fungsi negara pada hakikatnya menyelenggarakan fungsi utama yaitu fungsi pengaturan dan fungsi pelayanan (Wolniak & Skotnicka-Zasadzień, 2021). Fungsi pengaturan dan fungsi pelayanan menyangkut pada semua segi kehidupan dan penghidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan dalam pelaksanaannya dipercayakan kepada aparatur pemerintah tertentu yang secara fungsional bertanggung jawab atas bidang-bidang tertentu dalam kedua fungsi tersebut (Mutiarin, 2014).

Berdasarkan perkembangannya para peneliti inklusi Indonesia memiliki definisi-definisi tersendiri, yang tentu dapat dipengaruhi oleh pemikiran Blau yang mengutaman sebuah intetaksi sosial dan tidak melakukan ekslusi sosial. Seperti yang dikemukakan oleh simarmata, Inklusi Sosial adalah sebuah proses yang memberikan daya pada individu atau pada kelompok tertentu untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan sosial baik secara menyeluruh ataupun secara sebagain. Inklusi sosial dapat diartikan sebagai proses yang memungkinkan individua tau kelompok tertntu berpartisipasi dalam kehidpan sosial, baik secara penuh maupun secara sebagian.

UU Nomor 25 tahun 2009 membahas mengenai pelayanan publik. Bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa membangun kepercayaan masayarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggaraan pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring denngan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tenntang peningkatan pelayanan publik, bahwa sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberikanpengaturan secara jelas, bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberik perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan pengaturan hukum yang mendukung.

* + 1. **PELAYAN INKLUSIF**

Sejarah perkembangan inklusif di dunia diawali dari negara-negara Scadinavia (Denmark, Norwegia, Swdia). Di amerika Serikat pada tahun 1960-an oleh Presiden Kennedy mengirimkan pakar-pakar Pendidikan Luas Biasa ke Scandinavia untuk mempelajari Mind Streaming dan Least Restrictive Environment, yang ternayat cocok untuk diterapkan di Amerika Serikat. Akar dari perkembangan inklusif juga terdapat di Eropa pada tahun 1700-an ketika para pionir tertentu mulai membuat upaya-upaya untuk pendidikan anak berkebutuhan khusus (Fauzan et al., 2021).

Pengertian inklusi digunakan sebagai sebuah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka, mengajak masuk dan mengikut sertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya. Konsep inklusi muncul karena adanya prilaku bersifat eksklusi atau peminggiran orang-orang tertentu oleh masyarakat atau negara (Iryayo et al., 2018). Inklusif adalah sebuah proses yang berkelanjutan secara terus menerus untuk mencari dan menenukan cara terbaik dalam keragaman.

Pelayanan adalah melayani, mengurus, menyelesaikan kebutuhan seseorang atau sekelompok orang. Objek yang dilayani adalah masyarakat yang terdiri atas individu, golongan, dan organisasi. Pelayanan dikatakan sebagai proses pemenuhan sebuah kebutuhan aktivitas secara langsung yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya sehingga masyarakatnya mendapatkan sebuah kepuasan dari pelayanan tersebut. Terlebih apabila pelayanan tersebut telah menerapkan system yang cukup canggih, canggih disinih yaitu menggunakan alat teknologi yang memadai dalam pelayanan tersebut. Dengan demikian, waktu dalam pelayanan akan berjalan secara lebih efektif dan efisien, selain dengan teknologi juga dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai sehingga pelayanan tersebut dapat dilakukan secara maksimal (Laksana et al., 2019)

Pelayanan inklusif merupakan sebuah pelayanan yang mampu menghilangkan kendala yang dihadapi oleh masyarakat untuk mengakses sebuah pelayanan public. Kendala dalam pelayanan akan muncul dan akan mendorong terjadinya sebuah kegagalan publik dalam mengakses sebuah pelayanan publik, hal ini disebabkan oleh karakteristik baik karakteristik sosial, ekonomi, fisik maupun secara demografis, yang tercermin dengan ketidak mampuan membayar, difabilitas dan rendahnya permintaan (Zakiyah et al., 2016)

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan inklusif merupakan sebuah pelayanan kebutuhan warga negara dengan melihat persamaan, keadilan, dan hak individual dalam pembagian sumber-sember seperti dalam pendidikan, sosial, ekonomi, dan pemerintahan. Pelayanan inklusif dalam bidang pemerintahan menjadi sebuah tugas dan tanggung jawab para birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang berkaitan dengan sebuah kebutuhan dan tuntutan dalam rangka mencapai sebuah kesejahteraan bersama.

Model-model pelayanan inklusif pada aspek service outcome dan system function

1. Service Outcome
2. Openness (Keterbukaan)

Menurut (Allman, 2013) dalam jurnal membahas mengenai konsep keterbukaan dalam konteks inklusif sosial. Dalam jurnal tersebut, keterbukaan dapat ditunjukkan pada sikap, perilaku, atau kebijakan yang mendukung transparansi, komunikasi yang jujur, dan akses terbuka terhadap informasi, ide, atau sumber daya dalam masyarakat. Keterbukaan sosial dapat menjadi salah satu aspek penting dalam memahami bagaimana inklusi sosial dan ekslusi sosial terbentuk, dipertahankan, atau diatasi dalam berbagai konteks sosial.

Dalam analisis inklusi sosial, keterbukaan dapat menjadi landasan untuk membangun hubungan yang sehat, memperkuat kepercayaan antarindividu dan kelompok, serta mendorong kolaborasi dan inovasi. Oleh karena itu, pembahasan tentang keterbukaan dalam jurnal ini dapat memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana sikap dan praktik keterbukaan dapat memengaruhi dinamika inklusi sosial dalam masyarakat.

1. Justuce (keadilan)

Menurut (Stienstra, 2023) pada bukunya yang berjudul “(Th)reading Rights and Justice: Women and Grils with Disabilities” membahas mengenai keadilan, terutama pada konteks hak-hak dan keadilan bagi perempuan dan perempuan dengan penyandang disabilitas. Dalam buku tersebut menyoroti mengenai sebuah tantangan yang harus mereka hadapi dalam mendapatkan sebuah pendidikan, kesehatan, pelayanan publik dan keadilan. Selain itu, dalam buku ini berisi beberapa elemen-elemen kunci dari sebuah keadilan yang dibahas dalam hubungan dengan hak-hak penyandang disabilitas.

1. Community Satisfaction (Kepedulian Pemerintah)

Menurut (Wolniak & Skotnicka-Zasadzień, 2021) dalam jurnal yang berjudul “improvement of services for people with disabilities by public administration in silesian province poland” membahas menganai kepedulian pemerintah kepada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat disabilitas. Penelitian ini berfokus pada sebuah analisis tingkat kepuasan masyarakaat disabilitas dengan layanan bagi disabilitas, dengan menyoroti sebuah layanan yang diberikan oleh pemerintah pada masyarakat. Dalam studi ini menyoroti pentingnya sebuah perencanaan pelayanan publik yang memperhatikan sebuah kebutuhan masyarakat disabilitas dan bagaimana pemerintah berperan dalam menikatkan kualitas pelayanan publik mereka kepada masyarakat disabilitas.

1. System Function
2. Responsivitas

Menurut (Mumpuni & Zainudin, 2018) dalam jurnalnya yang berjudul “Aksesbilitas Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Publik di Kabupaten Tegal” membahas mengenai responsivitas terhadap aksesbilitas penyandang disabilitas dalam perlayanan purblik di Kaburpatern Tergal. Rersponsivitas ini merncangkurp berberrapa rerspon permerrintah dan masyarakat dalam mermernurhi serburah kerburturhan dan hak-hak pernyandang disabilitas dalam merngaksers layanan purblik.

Faktor-faktor yang akan mermperrkurat adanya korerlasi yang signifikan antara aksersibilitas pernyandang disabilitas dalam perlayanan purblik di Kaburpatern Tergal adalah kerterrlibatan masyarakat dan kerlurarga bagi disabilitas. Perlayanan yang ramah disabilitas ada lima bidang, yaitur bidang erkonomi, bidang kerserhatan, bidang perndidikan, bidang burdaya ataur keragaman, dan bidang politik. Serlain itur permerrintah jurga harurs mermberrikan perlayanan khursurs bagi disabilitas yang tidak dapat merngaksers perlayanan purblik terrserburt. Orang-orang di serkitar masyarakat disabilitas harurs mermberrikan durkurngan pernurh kerpada pernyandang disabilitas urnturk merngaksers perlayanan purblik.

1. Infrastrurkturr

Mernurrurt (König ert al., 2021) dalam jurrnal yang berrjurdurl “A Participatory Quralitativer Analysis Of Barrierrs Of Purblic Transport By Perrsons With Disabilitiers From Servern Erurroperan Citiers” mermbahas merngernai infrastrurkturr terrkait derngan aksersibilitas transportasi purblik pernyadang disabilitas, dari berberrapa bagian pada jurrnal terrserburt mermbahas merngernai hambata-hambatan yang terrkait derngan infrastrurkturr serperrti tangga, lift, trotoar, dan perrsimpangan jalan yang di laluri olerh pernyandang disabilitas. Pada jurrnal ini jurga mermberrikan serburah wawasan yang pernting urnturk bagaimana infrasrurkturr yang tidak ramah akan disabilitas akan mernghambat pernggurnaan transportasi purblik bagi disabilitas.

1. Hurman Rersourrcers Managermernt (HRM)

Mernurrurt (Van Berrkerl, 2021) dalam jurrnalnya konterks kerterrlibatan perngursaha dalam mermprommosikan partisipasi pasar ternaga kerrja yang serbagai pernyandang disabilitas. Dalam jurrnal terrserburt yang dihadapi olerh perngursaha dalam mernermpakan pernyandang disabilitas pada organisasi merrerka, serrta merndurkurnng masyarakat yang diharpakan dapat merngatasi tantangan-tantangan terrserburt.

**Merujuk pada WHO Disability Action dan Health System Strengthening, ada tujuh strategi dalam pelayanan kesehatan inklusif bagi disabilitas, yaitu:**

1. Merngatasi hambatan fisik dan informasi dalam merngaksers serburah layanan
2. Mernyerdiakan ternaga Kerserhatan yang terrampil dan perka dalam disabilitas
3. Mernyerdiakan layanan Kerserhatan yang mernyerlurrurh
4. Mernguratkan merkanismer dan perlermbagaan implermerntasi kerrangka kerbijakan.
5. Merndorong kerbijakan dan program yang berrlandaskan informasi yang akurrat.
6. Merningkatkan partisipasi pernyandang disabilitas
7. Merningkatkan anggaran dalam serktor Kerserhatan di tingkat pursat dan daerrah urnturk perngermbangan layanan inklursif (Kermkers RI, 2019)

Pernyerdiaan layanan dalam Kerserhatan yang inklursif bagi pernyandang disabilitas merrurpakan tanggurng jawab nergara yang dapat dipernurhi seracar berrtahap. Agar pernyandang disabilitas dapat mermperrolerh standar Kerserhatan yang baik, layanan Kerserhatan inklursif sangat perntinng urnturk diterrapkan. Implermerntasi dari konserp layanan Kerserhatan inklursif mermberrikan kersermmpatan yang sama bagi sermura warga nergara tak terrkercurali pernyandang disabilitas, urnturk merndapatkan layanan Kerserhatan yang terrjangkaur baik sercara fisik dan erkonomi, terrjangkaurnya aksers informasi, yang berrsifat nondiskriminasi, terrserdia sercara mermadai, berrkuralitas, dan sersurai derngan kerburturhan para pernyandang disabilitas.

Dalam mermperrolerh layanan Kerserhatan, pernyandang disabilitas serring kali mernerrima hambatan dalam layanan terrserburt. WHO (2021) merngermurkakan ada ermpat hambatan bagi pernyandang disabilitas dalam merngaksers layanan kerserhataan, yaitur hambatan terrkait sikap, hambatan sercara fisik, hambatan dalam komurnikasi, dan yang terrakhir ada hambatan sercara fisial ataur perrerkonomian (Tri Nurker Purdjiasturti ert al., 2022)

Implermerntasi dalam permernurhan hak Kerserhatan dan layanan Kerserhatan bagi pernyandang disabilitas berlurm maksimal. Masih banyak perrsoalan dalam implermerntasi layanan Kerserhatan inklursif, serperrti perrsoalan terrkait sarana dan prasarana dalam layanan Kerserhatan yang berlurm aksersiberl bagi para pernyandang disabilitas. Serlain jurga perrsoalan dalam rergurlasi dalam merndurkurng urpaya permnnurhan hak-hak Kerserhatan para pernyandang disabilitas. Serlain itur jurga terrkait data para pernyandang disabilitas, banyak warga yang tidak masurk ker dalam data Pernyandang Masalah Kerserjahterraan Sosial ataur biasa diserburt derngan MPKS. MPKS serndiri mermiliki arti individura taur serkerlompok masyarakat yang mermiliki hambatan, kersurlitan ataur gangguran, dan tidak dapat merlaksanakan sersurai derngan furngsinya. Serhingga masyarakat terrpernurhinnya kerburturhan hidurpnya sercara mermadai dan sercara wajar.

Perrmasalahan-perrmasalahan yang di hadapi olerh pernyandang disabilitas dalam mermperrolerh serburah perlayanan inklursif masih banyak yang berlurm mermperrolerhnya. Padahal dalam konterks Hak Asasi Manursia ataur HAM merjerlaskan bahwa “hak” merrurpakan urnsurr normativer yang mermiliki furngsi serbagai perdoman dalam berrperrilakur, merlindurngi dalam kerberbasan, kerkerbalan serrta mernjamin adanya perlurang bagi manursia dalam mernjaga harkat serrta martabatnya.

Serlain dalam konterks HAM dalam nergerri, Konvernsi PBB merngernai hak para pernyandamg disabilitas jurga mernjadi instrurmernt dalam kerbijakan HAM dan bangurnan. Konvernsi ini berrturjuran urnturk merlindurngi dan mermastikan para pernyandang disabilitas dapat mernikmati sercara pernurhh dan serrta merrta sermura HAM dan kerberbasan dalam furndamerntal serrta mermerberrikan pernghargaan terrhadap harkat serrta martabat para pernyandang disabilitas.

* + 1. **PENYANDANG DISABILITAS**

Mernurrurt Kamurs Bersar Bahasa Indonersia pernyandang diartikan derngan orang yang mernyandang ataur mernderrita sersuratur, serdangkan disabilitas merrurpakan kata dalam Bahasa Indonersia yang berrasal dari kata serrapan yang dalam bahsa Inggris disability yang mermiliki arti cacat ataur kertidak mampuran. Mernurrurt John C. Maxwerll, difaberl adalah serserorang yang mermpurnyai kerlainan fisik dan ataur yang dapat merngganggur aktivitas (Surgiono ert al., 2014)

Dalam pasal 1 ayat 1 Urndang-Urndang Nomor 8 Tahurn 2016 terntang pernyandang disabilitas diserburtkan bahwa “pernyandang disabilitas adalah sertiap orang yang mermiliki kerterrbatasan fisik, interlerktural, merntal, dan sernsorik dalam jangka waktur yang curkurp lama yang berrinterraksi derngan lingkurngan dapat merngalami hambatan dan kersurlitan urnturk berrpartisipasi sercara pernurh dan erferktif derngan warga nergara lainnya berrdasarkan kersamaan pada hak.

Ada berberrapa jernis orang derngan kerburturhan khursurs ataur disabilitas. Hal ini mernurnjurkkan bahwa sertiap pernyandang diabilitas mermiliki derfinisi masing-masing yang mana kersermurannya mermerrlurkan banturan urnturk terrurs turmburh dan berrkermbang sercara baik. Pernyandang disabilitas berrdasarkan Pasal 4 Urndang-Urndang No. 8 Tahurn 2016 dapat dikatergorikan kerdalam 4 kerlompok:

1. Pernyandang Disabilitas Fisik, yaitur terrganggurnnya furngsi gerrak, antara lain ampurtasi, lurmpurh layur ataur kakur, paraplergi, cerlerbral palsy (CP), akibat stoker, akibat kursta, dan orang kercil. Kerlainan ini merlipurti berberrapa macam yaitur:

* Kerlaianan turburh (Turna Daksa), turna daksa adalah individur yang mermiliki gangguran pada perrgerrakannya yang diserbabkan olerh kerlainan nerurromurscurlar dan strurkturr dalam turlang yang berrsifat bawaan, sakit ataur akibat daari serburah kercalakaan (kerhilangan organ) polio ataur lurmpurh.
* Kerlainan Indra Pernglihatan (Turna Nertra), turna nertra adalah individur yang mermiliki hambatan dalam pernglihatannya. Turna nertra diklasifikasikan ker dalam dura golongan yaitur golongan burta total ataur blind dan golongan low vision.
* Kerlainan pada pernderngaran (Turna Rurngur), turna rurngur adalah individur yang mermiliki hambatan dalam pernderngarannya baik sercara perrmanern maurpurn sercara sermerntara, kerrana miliki hambatan dalam pernderngarannya pernyandang disabilitas turna rurngur mermiliki hambatan dalam berrbicara serhingga merrerka jurga diserburt serbagai Turna Wicara.
* Kalainan dalam berrbicara (Turna Wicara), turna wicara adalah serserorang yang merngalami kersurlitan dalam merngurngkapkan pikiran merrerka mermaluri Bahasa yang verrbal, serhingga merrerka akan surlit bahkan tidak dapat dimerngerrti olerh orang lain. Kalainan dalam berrbiacara ini berrsifat furngsional, dimana kermurngkinan diserbabkan karerna kerturnarurngan, dan organik yang mermang diserbabkan adanya kertidak sermpurrnaan organ bicara maurpurn ada gangguran pada organ motorik merrerka yang sangat berrkaitan derngan berrbicara.

1. Pernyandang disabilitas interlerktural, yaitur merrurpakan terrganggurnnya furngsi dalam berrpikir karerna tingkat kercerrdasan merrerka berrada di bawah rata-rata, antara lain lambat berlajar, disabilitas grahita, dan down syndrom.
2. Pernyandang disabilitas merntal, merrurpakan terrganggurnya furngsi pikir, ermosi, dan perrilakur, antara lain:

* Psikososial diantaranya skizofrernia, bipolar, derprersi, anxiertas, dan gangguran kerpribadian.
* Disabilitas perrkermbangan yang berrperngarurh pada kermampuran interrkasi sosial di antaranya aurtis dan diperraktif.

1. Pernyandang disabilitas sernsorik, yang terrganggurnya salah satur furngsi dari panca indra, antara lain disabilitas nertra, disabilitas rurngur, dan disabilitas wicara.
   * 1. **KARAKTERISTIK DISABILITAS**

Disabilitas ataur orang derngan kerburturhan khursursmermiliki derfinisi, jernis, dan karakterristik masing-masing. Dimana sermuranya mermerrlurkan banturan urnturk turmburh dan berrkermbang sercara baik. Disabilitas mermiliki ciri ataur karerkterristik yang berrberda pada sertiap pernyadangnya, karakterristik disabilitas terrserburt yang mernjadikan disabilitas mermiliki banyak ragam. Karakterristik disabilitas dibagi mernjadi:

1. Karakterristik Disabilitas Turna Nertra, dalam hal karakterristik Turna Nertra (Purrba Bagurs Surnarya ert al., 2018) mernjerlaskan bahwa pada urmurmnya, turna nertra akan merngalami kerterrberlakangan permahaman sercara konserptural. Lertak dari hambatan ini terrlertak pada stimurlasi sernsorik, komurnikasi, dan konserp perrkermbangan kognitif itur serndiri. Disabilitas turna nertra mermiliki kermampuran orierntasi mobilitas, yaitur kermampuran urnturk berrgerrak dan berrpindah termpat dari satur termpat ker termpat lainnya serrta merngernal lingkurngan di serkerlilingnya. Berrdasarkan surara, turna nertra hanya akan mampur mernderterksi dan mernggambarkan merngernai arah, surmberr, jarak pada suratur obyerk, informasi pada urkurran dan kuralitas suratur rurangan, tertapi tidak mampur mermberrikan serburah gambaran yang sangat kongkrert merngernai serburah bernturk, kerdalaman, warna, dan dinamikanya.
2. Karakterristik disabilitas turna rurngur, mermiliki karakterristik yang interlergernsi yang sercara poternsial sama derngan masyarakat pada urmurmnya, namurn disabilitas turna rurngur masih kurrang mampur dalam merngermbangkan serburah furngsi dari interlergernsinya. Hal ini diserbabkan olerh adanya kerterrbatasan dalam kermampuran furngsi aurditori yang dapat merngakibatkan kurrangnya kermampuran dalam perngurasaan Bahasa dan gangguran dalam serburah komurnikasi dan informasi.
3. Karakterristik disabilitas turna daksa, karakterristik pada pernyandang disabilitas turna daksa lerbih serring akan mernurnjurkkan kerserdihan, derprersi, strers, jarang terrsernyurm, kercermasan, panarikan diri, dan ermosional. Pola-pola ermosi pada disabilitas turna daksa adalah serperrti serdih,marah, cermas, takurt, dan mernarik diri. Akan tertapi, sertiap pernyandang disabilitas turna daksa tidak serlalur berrada dalam kondisi karakterristik sama derngan pernyandang disabilitas turna daksa yang lain. Perrasaan kercerwa dan marah karerna kondisi fisiknya terrserburt maka akan murncurlnya rasa tidak perrcaya diri pada pernyandang disabilitas turna daksa terrserburt.
4. Karakterristik pernyandang disabilitas turna wicara, Mernurrurt herri purrwanto karakterristik dalam disabilitas turna wicara adalah pada ciri Bahasa dan turturr katanya. Pada urmurnya merngalami kerterrlambatan perrkermbangan bahasa dan bicara dibandingkan derngan perrkermbangan masyarakat normal lainnya. Dalam hal interraksi sosial derngan masyarakat, disabilitas turna wicara akan merngalami kersurlitan dalam berrkomurnikasi dalam adaptasi sosial, yang diakibatkan olerh gangguran bicara. Pandangan dan erksprersi dari masyarakat saat merlakurkan komurnikasi derngan pernyandang disabilitas turna wicara mernyababkan merrerka merrasa tidak perrcaya diri, serhingga saat berrbicara di derpan urmurm akan mernimburlkan kercermasan pada pernyandang disabilitas turna wicara. Ciri-ciri lain dari turna wicara, yaitur merrerka akan merngalami kersurlitan dalam mernangkap isi permbicaraan dari orang lain dan serring mernggurnakan tanda-tanda dalam merrerka berrkomurnikasi.
   * 1. **HAK DAN KEWAJIBAN DISABILITAS**

Pernyandang disabilitas digolongkan serbagai salah satur kerlompok yang rerntan. Kerlompok rerntan yakni kerlompok yang paling serring mernerrima perrlakuran diskriminasi dan hak-haknya serring tidak terrpernurhi. Padahal pernyandang disabilitas mermiliki kerdurdurkan, hak dan kerwajiban yang sama derngan masyarakat non disabilitas..

Hak-hak urnturk pernyandang disabilitas derngan mernyerdiakan bidang miring di gerdurng-gerdurng permerrintahan bahkan pada gerdurng-gerdurng fasilitas purblik, mernyerdiakan ternaga pernerrjermah bagi turna wicara di fasilitas-fasilitas Kerserhatan serperrti purskersmas dan rurmah sakit, garis purturs-purturs di jalan-jalan ataur trotroar urnturk pernyandang disabilitas.

Permerrintah harurs merwurjurdkan kersertaraan bagi pernyandang disabilitas yang berrturjuran urnturk, merwurjurdkan pernghormatan, permajuran, perrlindurngan, dan permerurnurhan hak asasi manursia serrta kerberbasan dasar pernyandang disabilitas sercara pernurh dan sertara, mernnajmin urpaya pernghormatan, permajuran, perrlinndurngan, dan permernurhan hak serbagai martabat yang merlerkat pada diri pernyandang disabilitas, merwurjurdkan taraf kerhidurpan pernyandang disabilitas yang lerbih berrkuralitas adil, serjahterra lahir dan batin, mandiri, serrta berrmartabat, merlindurngi pernyandang disabilitas dari pernerlantaran dan erksploitasi, perlercerhan dan sergala tindakan diskriminatif, serrta perlanggaran hak asasi manursia, dan mermastikan perlakasanaa urpaya pernghormatan, permajuran, perrlindurngan, dan permernurhan hak pernyandang disabilitas.

* + 1. **PARTISIPASI DISABILITAS**

Partisipasi merrurpakan serburah hak asasi yang dimiliki olerh sertiap warga nergara. Urndang-urndang Dasar 1945 serbagai perraturran terrtinggi di Indonersia yang mernjamin hak dalam berrpartisipasi bagi sertiap warga nergara. Diantaranya dalam pasal 28 UrUrD 1945 mernyatakan “kermerrderkaan berrserrikat dan berrkurmpurl, merngerlurarkan pikiran derngan lisan dan turlisan dan serbagainya ditertapkan derngan Urndang-Urndang”. Serlanjurtnya pada pasal 28C ayat 2 mernyatakan "sertiap orang berrhak urnturk ermajurkan dirinya dalam mermperrjurangkan haknya serrta kolerktif urnturk mermbangurn masyarakat, bangsa, dan nergaranya”.

Dalam kerhidurpan yang berrbangsa dan berrnergara, sertiap warga nergara mermiliki kersermpatan yang sama dalam berrpartisipasi baik masyarakat urmurm maurpurn masyarakat derngan kerburturhan khursurs ataur disabilitas. Masyarakat disbilitas mermiliki hak urnturk berrpartisipasi serperrti masyarakat lainnya. Hak berrpartisipasi bagi pernyandang disabilitas diingatka Kermbali pada Konvernsi PBB merngernai Hak-Hak Pernyandang Disabilitas yang terlah disahkan dalam UrUr Nomor 19 tahurn 2011. Dalam UrUr nomerr 19 tahurn 2011 ada pasal 29 yang merngaturr “partisipasi dalam kerhidurpan politik dan purblik”

Serlain itur dalam Urndang-Urndang Nomor 8 tahurn 2016 merngernai Pernyandang Disabilitas pada pasal 75 merngatalan “Permerrintah dan Pmerrintah Daerrah wajib mernjamin agar pernyandang disabilitas dapat berrpartisipasi sercara erferktif dan pernurh dalam kerhidurpan politik dan purblik sercara langsurng ataur merlaluri hak dan kersermpatan bagi pernyandang disabilitas urnturk mermilih dan dipilih.

Dalam UrUr terntang Disabilitas diatas mernyerburtkan bahwa permerrintah dan permerrintah daerrah wajib mernjamin partisipasi dalam permernurhan serburah hak disabilitas. Olerh karerna itur, Palurr merrintah Daerrah Kaburpatern Tergal dalam Perraturran Daerrah Kaburpatern Tergal Nomor 5 Tahurn 2021 terntang Perrlindurngan dan Permernurhan Hak Pernyandang Disabilitas yang berrburnyi “Permerrintah Daerrah wajib mernjamin agar Peryandang Disabilitas dapat berrpartisipasi sercara erferktif dan pernurh dalam kerhidurpan politik dan purblik sercara langsurng ataur merlaluri perrwakilan”.

Dalam bernturk perlayanan masyarakat disabilitas jurag mermiliki kersermpatan urnturk ikurt berrpartisipasi. Berrikurt merrurpakan serburah stratergi dalam mermbangurn partisipasi disabilitas dalam serburah kerbijakan purblik:

1. Pernyandang Disabilitas harurs berrperran aktif dalam berrbagai tahapan maurpurn prosers serburah pernyursurnan kerbiajakn ataur perraturran daerrah.
2. Kerterrlibatan agern dalam permbaharuran dari lurar komurnitas urnturk pernyandang disabilitas hanya mermberrikan dorongan dan mermurdahkan dalam berrpartisipasi tertapi burkan serbagaur perrilakur urtama.
3. Pernguratan dalam kerdaurlatan serburah komurnitas pernyandang disabilitas merlaluri advokasi yang berrturmpur pada serburah hak asasi manursia dan serbagai warga yang dermokratis.
4. Perngermbangan serburah organisasi pernyandang disabilitas baik dalam tingkat kercamatan samapi derngan tingkat dersa serbagai merdia urnturk mermperrkurat dan merningkatkan kapasitas dan kapabilitas pernyandang disabilitas.
5. Perningkatan serburah kurantitas dan kuralitas dalam partisipasi pernyandang disabilitas dalam berrbagai forurm ataur dalam kergiatan serperrti perlatihan, dan mursyawarah lainnya urnturk pernguratan dalam berberrapa ragam disabilitas yang ada.
6. Merngikurti kaderrisasi merrurpakan serburah permerbnturkan diri, permbangurnan dalam kapsitas diri, dan perngorganisasian dalam pernyandang disabilitas.
7. Kerterrlibatan dalam keraktifan dalam permbangurnan serburah partisipasi.
8. Pernguratan advokasi dalam hal kerbijakan (Surrwanti ert al., 2017)

Serlain dalam partisipasi kerbijakan purblik, disabilitas jurga mermiliki hal dalam partisiapsi ker permiluran. Sermura masyarakat serbagai warga yang surdag mermernurhi dalam perrsyaratan serbagai permilih dalam permilur mermiliki hak, kerdurdurkan, dan perranan yang sama.

Dermikian purla dalam serburah permilihan, pernyandang disabilitas mmermiliki .hak yang sama yaitur serbagai warga nergara. Kerterrbatasan fisik dan non fisik yang serharursnya tidak merngurrangi haknya serbagai warga nergara dalam hal kerhidurpan, terrmasurk dalam hak dijaminnya hak politik yang dimilikinya (Derdi & Surdarmo, 2020)

## II.3. HIPOTESIS PENELITIAN

Hipotersis serndiri mermiliki artiserburah durgaan ataur terrkaan merngani apa saja yang diamati dalam ursaha urnturk mermahami serburah jawabannya. Hipotersis adalah serburah jawaban sermerntara dari suratur perrmasalahan yang serdang dikaji. Hipotersis dalam perneritian ini serbagai berrikurt:

Ha: Sisterm furnction dan serrvicer ourtcomer dapat mermperngarurhi perlayanan inklursi.

Ho: Sisterm furnction dan serrvicer ourtcomer tidak berrperngarurh pada perlayanan inklursi.

Rerlervan dalam hipotersis diatas dapat dirurmurskan hipotersisi merrurpakan Tindakan pada pernerlitin ini adalah, moderl perlayanan inklursif dapat mermbantur masyarakat pernyandang disabilitas dalam merndapatkan serburah perlayanan purblik yang prima.

## II.4. DEFINISI KONSEPSIONAL

Derfinisi konserp sional merrurpakan serburah urnsurr dalam pernerlitian yang mernjerlaskan serburah karakterristik suratur masalah yang herndak diterliti. Terrkait derngan pernerlitian ini, pernerlitian akan mernjerlaskan berberrapa derfinisi konserp dalam pernerlitian ini, yaitur:

1. Perlayanan Inklursi

Perlayanan inklursi merrurpakan serburah perlayanan urnturk kerburturhan warga nergara derngan merlihat perrsamaan, keradilan, dan hak individural dalam permbagian surmberr-surmberr serperrti, perndidikan, sosial, erkonomi, dan permerrintahan. Perlayanan inklursif jurga dikatan serbagai perlayanan khursurs urnturk pernggurnaan layanan yang mermiliki kerburturhan khursurs, serperrti lanjurt ursia, ibur hamil, ibur mernyursuri, dan pernyandang disabilitas.

1. Perlayanan Prima

Perlayanan prima adalah serburah perlayanan yang terrbaik di dalam mermernurhi serburah harapan dan kerburturhan masyarakat. Derngan kata lain, perlayanan prima merrurpakan serburah perlayanan yang dapat mermernurhi standar kuralitas dalam merlayani masyarakat (Riyanti ert al., 2020)

## II.5. DEFINISI OPERASIONAL

Agar konserp data yang diterliti dapat disajikan sercara ermpiris, maka konserp terrserburt harurs dioperrasioalkan derngan cara merngurbahnya mernjadi variabler ataur seruratur yang miliki nilai.

**Tabel 2.2 Definisi Operrasional**

| **Variabel** | **Indikator** |
| --- | --- |
| Inklusi | * System Function  1. Responsivities 2. Infrastruktur 3. Human Resources and Management (HRM)  * Service Outcome  1. Keterbukaan (Openness) 2. Keadilan (Justice) 3. Kepedulian Masyarakat (Communnity Satisfaction) |
| Pelayanan | UU Nomor 25 tahun 2009  Hak:   * Memberikan pelayanan tanpa menghambat pihak lain yang bukan tugasnya. * Melakukan kerja sama * Mempunyai anggaran pembiayaan penyelenggraan pelayanan publik * Melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam penyelenggaran pelayanan publik. * Menolak permintaan pelayanan yang bertenntangan dengan peraturan perundang—udnangan. |

## II.6. ALUR PIKIR

**Tabel 2.3 Alur Pikir**

Y

Pelayanan

UU Nomor 25 tahun 2009

* Hak:

1. Memberikan pelayanan tanpa menghambat pihak lain yang bukan tugasnya.
2. Melakukan kerja sama.
3. Mempunyai anggaran pembiayaan penyelenggaraan pelayanan publik.
4. Melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan publilk
5. Menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undang

X

Inklusi

* System Function

1. Responsivities
2. Inftastruktur
3. Humam Resources and Management (HRM)

* Service Outcome

1. Keterbukaan (Openness)
2. Keadilan (Justice)
3. Kepedulian Masyarakat (Community Satisfaction)

Ha : System function dan service outcome dapat mempengaruhi pelayanan inklusi.

Ho : System function dan service outcome tidak berpengaruh pada pelayanan inklusi.

# BAB III

# METODE PENELITIAN

## III.1. PENDEKATAN PENELITIAN

Pernderkatan pada pernerlitian ini yang digurnakan dalam pernerlitian ini yaitur pernderkatan kurantitatif. Pernderkatan kurantitatif merrurpakan pernderkatan yang mertoder pernerlitian data pernerlitiannya mernggurnakan angka-angka dan analisisnya mernggurnaan stastistik.

## III.2. JENIS DAN TIPE PENELITIAN

Jernis yang digurnakan dalam pernerlitian ini adalah pernerlitian kurantitantif. Pernerlitian kurantitatif merrurpakan jernis pernerlitian yang berrdasarkan pada perngurmpurlan dan analisis data dalam bernturk angka ataur nurmerrik urnturk mernjerlaskan, mermprerdiksi, dan merngontrol fernomerna yang diminati. Jernis pernerlitian yang digurnakan dalam pernerlitian ini yaitur jernis pernerlitian Derskriptif.. Mertoder pernerlitian kurantitatif serperrti derskriptif ini berrturjuran urnturk merlurkiskan sercara sistermatis fakta ataur karakterristik popurlasi terrterntur ataur bidang terrterntur sercara faktural dan cerrmat. Mernurrurt (Ardiani & Surdana, 2018) pernerlitian kurantitatif dapat diartikan serbagai mertoder pernerlitian yang berrlandaskan pada filsafat positif, digurnakan urnturk mernerliti popurlasi ataur samperl, analisis data berrsifat kurantitatif ataur statistik derngan turjuran urnturk merngurjji hipotersis yang terlah ditertapkan. Pernerlitian kurantitatif berrturmpur pada perngurmpurlan data. Data yang dimaksurd disinih berrurpa data angka hasil perngurkurran. Olerh karerna itur, dalam pernerlitian ini statistik mermergang perranan yang curkurp pernting serbagai alat urnturk mernganalisis serburah jawaban pada suratur masalah.

III.3. POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN

**3.3.1 POPULASI PENELITIAN**

Mernurrurt (Lerstari, 2020), Popurlasi adalah wilayah gernerralisasi yang terrdiri dari objerk ataur surbjerk yang mermiliki kuralitas dan, karakterristik terrterntur yang ditertapkan olerh pernerliti urnturk mermperlajari dan kermurdian ditarik kersimpurlan. Adapurn popurlasi dalam pernerlitian ini adalah Masyarakat Pernyandang Disabilitas di Kaburpatern Tergal. Berrdasarkan data dari Dinas Sosial Kaburpatern Tergal tahurn 2023 ada 3.910 pernyandang disabilitas, 3.166 pernyandang disabilitas derwasa yang merrurpakan jurmlah popurlasi dalam pernerlitian ini.

**3.3.2 SAMPEL PENELITIAN**

Samperl merrurpakan serburah bagian dari popurlasi yang diambil urnturk merwakili popurlasi sercara kerserlurrurhan yang dijadikan serbagai rerspondern dalam suratur pernerlitian. Mernurrurt (Rurkmayanti & Fitriana, 2022) , samperl adalah serburah bagian dari jurmlah dan karakterristik yang dimiliki olerh popurlasi terrserburt. Terknik perngambilank samperl yang dipakai adalah Terknik perngambilan Samperl Acak Serderrhana. Samperl Acak Serderrhana adalah serburah Terknik pernernturan samperl yang mermiliki kersermpatan yang sama bagi sertiap anggota popurlasi urnturk mernjadikan samperl pernerlitian.

Merngingat kerterrbatasan dalam hal waktur dan biaya pernurlis, yang curkurp bersar dalam merngambil data, pernurlis dapat mernernturkan samperl derngan mernggurnakan terori Slovin dan jurmlah samperl dikertahuri:

Teknik Slovin

Kerterrangan:

: Samperl

N : Popurlasi

: Tingkat kersalahan 10%

orang jurmlah masyarakat yang mernjadi samperl (diburlatkan pernurlis mernjadi 100 orang)

Kerterrangan:

Dari data pernyandang disabilitas di Kaburpatern Tergal yang berrjurmlah 3.910 derngan rincian: 744 pernyandang disabilitas anak-anak dan 3.166 pernyandang disabilitas derwasa. Yang dijadikan samperl dalam pernerlitian ini adalah pernyandang disabilitas derwasa, mmaka dari itur data pernyandang disabilitas 3..910 dikurrangi 744 pernyandang disabilitas anak-anak, maka hasilnya adalah 3.166 pernyandang disabilitas derwasa. Serjurmlah 3.166 kermurdian dijadikan samperl derngan perrhiturngan mernggurnakan Terknik slovin.

Urnturk mermperrkurat dalam pernerlitian ini, pernurlis mernambahkan informasi yaitur serorang pernerliti mernganggap bahwa serserorang ataur sersuratur terrserburt mermiliki informasi yang diperrlurkan bagi pernerliti. Adapurn jurmlah samperl yang diambil dari pernerlitian ini adalah serbagai berrikurt:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Teknik Pengumpulan Data | Sub Populasi | Populasi | Jumlah  Sampel | Presentase |
| 1 | Quisionel (angket) | Masyarakat Disabel Kabupaten Tegal | 3.166 | 100 | 100% |
| **Jumlah** |  |  | **3.166** | **100** | **100%** |

**III.4.** JENIS DAN SUMBER DATA

Dalam perngurmpurlan surmberr ddata, pernerliti merlakurkan perngurmpurlan surmberr data dalam wurjurd dara primerr dan data serkurnderr.

1. Data Primerr

Data Primerr adalah jernis dan surmberr data dalam pernerlitian yang di perrolerh sercara langsurng. Data primerr sercara khursurs di lakurkan urnturk mernjawab perrtanyaan para pernerliti.

1. Data Serkurnderr

Data serkurnderr merrurpakan surmberr data dalam suratur pernerlitian yang di perrolerh pernerliti sercara tidak langsurng merlaluri merdia perrantara (di perrolerh ataur dicatat olerh pihak lain). Data serkurnderr berrurpa burkti, catatan ataur laporan historis yang terlah terrsursurn dalam arsip ataur dokurmern.

1. **Dinas Sosial**

* Keterbukaan :

Dalam menyebarkan informasi dinas sosial memiliki pendamping difabel, setiap pendamping difabel memiliki desa dampingan masing-masing, sehingga informasi yang dinas sosial berikan bisa melalui pendamping difabel. Kalau ada bantuan sosial atau bansos, dinas sosial dapat menyebarkan informasi lewat pendamping difabel, TKSK, PSM, dan pendamping PKH. Yang nantinya akan menjadi kepajangan tangan dinas sosial terhadap difabel atau komunis-komunitas difabel.

* Aksesbilitas :

Dari dinas sosial sendiri sudah ada program jemput bola, yaitu misal dari difabel mau mengecek DTKS (Data Terpadu Kesejateraan Sosial) bisa dilakukan melalui TKSK atau melalui kecamatan sehingga difabel tidak perlu ke kantor dinas sosial, selain itu dinas sosial sudah menyediakan PUSKESOS (Pusat Kesejahteraan Sosial) pada tiap tiap kecamatan, untuk mengecek bansos masih aktif atau tidak, tanya-tanya program-progman di dinas sosial sudah bisa melalui PUSKESOS.

* Infrastruktur :

|  |  |
| --- | --- |
| Jalur Landai | Jalannya sudah rata |
| Parkir Khusus Disabilitas |  |

* Kepedulian Pemerintah :

Ketika difabel membutuhkan pelayanan dan ke dinas sosial maka pelayanan yang diberikan akan didahulukan oleh pemberi pelayanan, contoh ketika ada difabel ke dinas sosial tidak bisa berjalan maka yang memberikan pelayanan tersebut akan menghampiri difabel tersebut.

1. **Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan**

* Keterbukaan

Dalam menyebarkan informasi sendiri dinas pendidikan dapat melalui desa, contohnya dinas pendidikan menyebarkan informasi terkait dengan pendidikan gratis di SDLB.

* Aksesbilitas

Dinas pendidikan dalam memberikan akses pendidikan kepada difabel dapat melalui pendidikan gratis melalui SDLB, SMPLB, SMALB. Selain itu juga saat ada difabel melakukan pelayanan di dinas pendidikan maka disediakan meja dan kursi khusus untuk mengakses pelayanan tersebut dan yang memberikan pelayanan akan menghampiri difabel tersebut di meja dan kursi khusus diafbel tersebut.

* Infrastruktur

|  |  |
| --- | --- |
| Kamar Mandi Khusus Difabel | Parkir Khusus Difabel |
| Jalur Landai | Tempat Duduk Khusus |
| Meja Pelayanan Khusus | Kuri Roda Khusus |

* Kepedulian Pemerintah:

Kedulian dinas pendidikan sendiri terhadap para difabel, yaitu dengan menyediakan pendampingan khusus kepada difabel dalm proses pendidikan supaya mendukung kelancaran dalam proses pembelajaran, terus meningkatkan kompetensi tenaga pendidik melalui pelatihan-pelatihan.

1. **Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**

* Keterbukaan :

Dinas kependudukan dan pencatatan sipil dalam menyebarkan informasi kepada difabel melalui FO (Front Office), loket informasi, loket konsultasi. Membuat inovasi pelayanan di desa, ketika ada informasi di dinas kependudukan dan pencatatan sipil ketika melakukan monev akan di sampaikan kepada pihak desa, karena pihak desa merupakan pihak yang paling dekat dengan warganya.

* Aksesbilitas :

Untuk mengakses pelayanan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil terdapat loket khusus untuk difabel atau kelompok rentan dan ada petugas yang melayani sendiri. Petugas yang melayani difabel atau kelompok rentan juga sudah melakukan pelatihan bahasa isyarat.

* Infrastruktur :

|  |  |
| --- | --- |
| Loket Khusus Difabel | Ruang Tunggu Difabel |
| Kursi Roda Untuk Difabel | Pegangan/Rambat |
| Parkir Khusus Difabel | Kamar Mandi Khusus Difabel |

* Kepedulian Pemerintah :

Ada layanan khusus jemput bola untuk kelompok rentan atau difabel, dari dinas kepedudukan dan pencatatan sipil datang ketempat difabel atau kelompok rentang tersebut membutuhkan pelayanan. Contoh ketika difabel atau kelompok rentan tersebut membutuhkan pelayanan dirumah atau dirumah sakit maka dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil dan dari desa akan ketempat tersebut, dari pihak keluarga menghubungi desa kalua membutuhkan pelayanan jemput bola nanti dari desa menghubungi dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

1. **Dinas Kesehatan**

* Keterbukaan :

Dinas kesehatan dalam memberikan informasi kepada difabel dilakukan dengan penyuluhan ke desa-desa, selain itu juga dengan menyebarkan informasi sosialisasi ke sekolah sekolah.

* Aksesbilitas :

Untuk mengakses pelayanan di dinas kesehatan bisa dilakukan di puskesmas-puskesmas terdekat dari rumah difabel tersebut.

* Infrastruktur :

|  |  |
| --- | --- |
| Ruangan Pelayanan Khusus Difabel | Kursi Roda Untuk Difabel |
| Jalur Khusus Kursi Roda | Kamar Mandi Khusus Difabel |
| Kursi Tunggu Khusus Difabel |  |

* Kepedulian Pemerintah :

Saat difabel melakukan pelayanan di dinas kesehatan maka terdapat ruangan khusus bagi difabel melakukan pelayanan tersebut, selain itu juga dari petugas pemberi pelayanan akan menghampiri difabel tersebut.

Taberl 3. 1 Data Sert

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Variabel | Ruang lingkup | Indikator | Bentuk data |
| X (Inklusif) | Kebijakan terkait dengan sistem pelayanan | Keterbukaan (Openness) | Kuisoner |
| Kebijakan terkait dengan sitem pelayanan | Keadilan (Justice) |
| Hasil penilai dan mekanisme evaluasi pelayanan | Kepuasan Masyarakat (Community Satisfaction) |
| Perilaku petugas dalam memberikan pelayanan, memberikan ruang pengaduan kepada masyarakat, tanggungjawab terhadap pengaduan masyarakat dan pertanyaan masyarakat terkait dengan pelayanan. | Responsif |
| Informasi dikemas agar dapat diketahui masyarakat disabilitas, mendukung disabilitas dalam pelayanan, kemudahan disabilitas dalam mendapatkan informasi. | Infrastruktur |
| Pemerintah memberikan pelatihan kepada petugas pelayanan terkait dengan cara melayani disabilitas, terdapat ruangan yang mendukung untuk pelaynan, prosedur pelayanan | Humam Resources and Management |
| Y (Pelayanan) | 1. Memberikan pelayanan tanpa menghambat pihak lain yang bukan tugasnya. 2. Melakukan kerja sama. 3. Mempunyai anggaran pembiayaan penyelenggaraan pelayanan publik. 4. Melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan publilk 5. Menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undang | Hak disabilitas menurut UU Nomor 25 Tahun 2009 | Kuesioner |

III.5. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Terknik perngurmpurlan data adalah cara yang digurnakan olerh pernerliti dalam rangka merngurmpurlkan data pernerlitian, perngurmpurlan data dan informasi dalam pernerlitian ini mernggurnakan terknik-terknik:

1. Dokurmerntasi

Dokurmerntasi adalah serburah perngurmpurlan data derngan cara merngambil data-data dari serburah catatan ataur dokurmerntasi yang diperrolerh merlaluri dokurmern-dokurmern ataur arsip-arsip dari Knator di Dinas Sosial Kaburpatern Tergal.

1. Kurisonerr

Surrvery adalah serburah mertoder risert derngan mernggurnakan kurisionerr serbagai instrurmernt dalam perngurmpurlan datanya. Turjurannya urnturk mermperrolerh informasi ternterng jurmlah rerspodern yang dianggap merwakili dalam popurlasi terrterntur. Dalam surrvery, prosers perngurmpurlan dan analisis data sangat terrstrurkturr dan merndertail merlaluri kurisionerr serbagai instrurmernt urtama urnturk merndapatkan informasi dari serjurmlah rerspondern yang diasurmsikan merwakili popurlasi sercara spersifik.

## III.6. TEKNIK ANALISIS DATA

## Validitas Dan Reabilitas Data

Permerriksaan data sangat diperrlurkan agar data yang terrkurmpurl dapat diperrcaya dan merwurjurdkan kerabsahan dari data terrserburt (mernurrurt crerswerll 2017). Pernertapan validitas kurantitatif dilakurkan merlaluri urji validitas konstrurk *(construrct validity)* dan validitas isi *(conternt validity)* dimana perngurjian dikernakan kerpada instrurmernt dari terknik perngurmpurlan data yang digurnakan pada saat surrveri, yaitur kurersionerr. Perngurkurran sah ataur tidaknya serburah kurersionerr adalah jika perrtanyaan ataur perrnyataan pada kurersionerr mampur merngurngkapkan hurburngan yang akan diurkurr olerh kurersionerr terrserburt, yakni korerlasi (misbach 2013).

Urnturk merngurji valid tidaknya suratur alat urkurr digurnakan pernderkataan sercara statistic, yaitur merlaluri nilai koerfisiern korerlasi skor burtir perrtanyaan derngan skor total: 0,6-0,8 maka perrnyataan terrserburt dinyatakan mermiliki validitas tinggi. Katergori validitas adalah serbagai berrikurt:

Taberl 3. 2 Katergori dan Validitas

|  |  |
| --- | --- |
| Sangat Tidak Setuju | 1 |
| Tidak Setuju | 2 |
| Netral | 3 |
| Setuju | 4 |
| Sangat Setuju | 5 |

Urji Validitas dilakurkan derngan mernghurburngkan masing-masing perrtanyaan derngan jurmlah skor urnturk masing-masing variabler, derngan mernggurnakan terknik korerksi. Perngurjian validitas pada pernerlitian ini dilakurkan derngan banturan softwarer SMART PLS urnturk perrhiturngan korerlasi dan Microsoft erxcerl urnturk perrhiturngan distribursi frerkurernsi.

Adapurn urji rerliabilitas data kurantitatif dilakurkan derngan terknik berlah dura, yaitur alat urkurr harurs mermurat banyak iterm (perrnyaan ataur perrtanyaan) yang merngurkurr asperk yang sama. Urji rerliabilitas merrurpakan alat urnturk merngurkurr suratur kurersionerr yang merrurpakan indikator dari variabler ataur konstrurk. Validitas konstrurk adalah kerrangka dari suratur konserp yang dipakai pada suratur pernerlitian derngan cara mernderfinisikan konserp sercara jerlas dan rinci serhingga dapat diurkurr.

Suratur kurersionerr dikatakan reraliberl ataur handal jika terrdapat konsisternsi jawaban serseroraang terrhadap perrnyataan ataur perrtanyaan (misbach 2013).

Serlain perngurkurran validitas dan rerliabilitas, urji frerkurernsi jurga dilakurkan pada indikator yang terlah mermernurhi urji validitas derngan turjuran urnturk merngerksplorasi indikator kurnci yang mermbernturk korerlasi antar variabler.

Dalam Terknik ini mernggurnakan ‘Rergrersi Linierr’, Rergrersi Linierr adalah terknik analisis data yang mermprerdiksi nilai data yang tidak dikertahuri derngan mernggurnakan nilai data lain yang terrkait dan dikertahuri. Sercara matermatis mermoderlkan variaberl yang tidak dikertahuri ataur terrganturng dan variaberl yang dikernal ataur inderperdern serbagai perrsamaan linierr. Moderl Rergrersi Linierr serderrhana dan mermberrikan rurmurs matermatis yang murdah ditafsirkan urnturk mernghasilkan prerdiksi. Rergrersi linierr adalah terknik statistik yang surdah ada dan murdah diterrapkan pada perrangkat lurnak dan kompurtasi. Bisnis mernggurnakannya urnturk merngonverrsi data merntah sercara andal dan dapat diprerdiksi mernjadi kercerrdasan bisnis serrta wawasan yang dapat ditindaklanjurti. Para ilmurwan di berrbagai bidang, terrmasurk biologi serrta ilmur perrilakur, lingkurngan, dan sosial mernggurnakan rergrernsi linierr urnturk merlakurkan analisis data awal dan mermprerdiksi trern masa derpan. Banyak mertoder ilmur data, serperrti *machiner lerarning* dan kercerrdasan buratan, mernggurnakan rergrernsi linierr urnturk mermercahkan masalah yang komplerks.

Urnturk cara kerrja rergrersi linierr serderrhana merncoba urnturk Mernyursurn grafik garis antara dura variaberl data, yaitur x dan y. Serbagai variaberl inderperndernt, x berrada di serpanjang surmbur horizontal. Variaberl inderperndernt jurga diserburt variaberl erksplanatori ataur variaberl prerdictor. Variaberl derperndern, y, berrada pada surmbur verrtikal. Merrurjurk pada nilai y serbagai variaberl yang rerspon ataur variaberl yang diprerdiksi.

Langkah-langkah dalam rergrersi linierr bernturk paling serderrhana dari perrsamaan grafik antara y dan x; y=c\*x+m derngan c dan m konstan urnturk sermura kermurngkinan nilai x dan y. jadi, serbagai contoh, anggaplah bawa sert data inpurt urnturk (x,y) adalah (1,5), (2,8), dan (3,11). Urnturk merngiderntifikasi mertoder rergrersi linierr, akan merlakurkan langkah-langkah berrikurt:

1. Burat garis lurrurs dan urkurr korerlasi antara 1 dan 5
2. Terrurs urbah arah garis lurrurs urnturk nilai barur (2,8) dan (3,11) hingga sermura nilai sersurai.
3. Iderntifikasi perrsamaan rergrersi linierr serbagai y=3\*x+2.
4. Ramalkan ataur prerdiksi bahwa y adalah 14 kertika x.

Terknik analisis data dalam pernerlitian ini mernggurnakan SmartPLS. Aplikasi olah data SmartPLS adalah serburahh softwarer dalam compurterr yang digurnakan urnturk mernganalisis data merlaluri pernderkatan *Variancer Baserd SErM* ataur biasa diserburt dergan *Partial Lerast Squrarer* ataur lerbih dikernal derngan PLS. Maka dari itur urnturk mernggurnakan perrhiturngan merlaluri pernderkatan terrserburt banyak yang mernggurnnakan aplikasi SmartPLS. Prosers merngolah data derngan mernggurakan aplikasi ini yaitur mernggurnakan mertoder *bootstrapping* ataur bisa jurga dikernal derngan pernggandaan sercara acak. Iturlah serbabnya, urji normalitas dapat derngan murdah urnturk dihiturnng. Derngan dermikian, tidak mermerrlurkan syarat minimurm dalam samperl. Bahkkan urnturk samperl kercil purn bisa mernggurnakan mertoder ini.

Kerrangka dasar dalam PLS, yaitur berrbernturk rergrersi linerar. Olerh serbab itur, sermura hal yang terrdapat dalam rergrersi linerar ada purla terrdapat pada PLS. hanya saja diberdakan symbol, lambing dan istilah yang berrberda. Dalam terknik PLS, bisa mernangani banyak variabler rerspon dan variabler erksplanatori.

Kerlerbihan SmartPLS:

1. SmartPLS ataur Smart Partial Lerast Squrarer adalah serburah softwarer statistic yang sama turjurannya derngan Lisrerl dan AMOS yaitur urnnturk merngurji hurburngan antar variabler.
2. Pernderkatan SmartPLS dianggap powerrfurl karerna tidak merndasarkan pada berrbagai asurmsi.
3. Jurmlah samperl yang diburturhkan dalam analisis rerlatf kercil. Pernggurnaan SmartPLS sangat dianjurrkan Kertika kita mermiliki kerterrbayasan jurmlah samperl sermerntara moderl yang dibangurn komplerks. Hal ini tidak dapat dilakurkan Kertika kita mernggurnakan kerdura softwarer di atas. Lisrerl dan AMOS mermburturhkan kercurkurpan dalam samperl.
4. Data dalam analisis SmartPLS tidak harurs mermiliki distribursi normal karerna SmartPLS mernggurnakan mertoder bootstrapping ataur pernggandaan seracara acak. Olerh karernanya asurmsi normalitas data, derngan dilakurkannya bootstrapping maka PLS tidak mernsyaratkan jurmlah minimurm samperl.
5. SmartPLS mampu merngurji moderl SErM formatif dan rerflerktif derngan skala perngurkurran indicator berrberda dalam satur moderl. Apapurn bernturk skalannya dapat diurji dalam satur moderl.

# BAB IV

# DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

**Geografi Wilayah Kabupaten Tegal**

**Gambar 4.1 Peta Kabupaten Tegal**

A map of the state of kabupaten

Description automatically generated

Surmberr: Perngadilan Agama 2021

Kabupaten Tegal memiliki luas wilayah 878,79 km² dengan batas sebelah utara Kota Tegal dan Laut Jawa, batas sebelah Timur Kabupaten Pemalang, batas sebelah Selatan Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas, dan batas sebelah Barat Kabupaten Brebes. Secara geografis Kabupaten Tegal terletak di bagian barat laut Provinsi Jawa Tengah, dengan letak geografis 108º57’6”-109º21’30” Bujur Timur dan 6º02’41”-7º15’30” Lintang Selatan. Dan mempunyai letak yang strategis pada jalan Semarang-Tegal-Cirebon serta Semarang-Tegal-Purwokerto dan Cilacap.

Kabupaten Tegal, kabupaten yang cukup luas di Provinsi Jawa Tengah. Sebagian besar wilayah adalah dataran rendah. Wilayah Kabupaten Tegal memiliki ketinggian yang cukup bervariasi, untuk wilayah kramat memiliki ketinggian 11 meter, untuk wilayah slawi 42 meter, untuk wilayah lebaksiu 135 meter, dan untuk wilayah bumijawa 949 meter.

## IV.1 Demografi Wilayah Kabupaten Tegal

**4.1.1 Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Tegal**

**Tabel 4.1 Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Tegal**

| Kecamata | Jumlah Desa | Jumlah Kelurahan | Daftar Desa/Kelurahan |
| --- | --- | --- | --- |
| Adiwerna | 21 | - | Adiwerna, Bersole, Gumalar, Harjosari Kidul, Harjosari Lor, Kalimati, Kaliwadas, Kedungsukun, Lemahduwur, Lumingser, Pagedangan, Pagiyante, Pecangakan, Pedeslohor, Penarukan, Pesarean, Tembok Banjaran, Tembok Kidul, Tembok Lor, Tembok Luwung, Ujungrusi. |
| Balapulang | 20 | - | Balapulang Kulon, Balapulang Wetan, Banjar Anyar, Batuagung, Bukateja, Cenggini, Cibunar, Cilongok, Danaraja, Danawarih, Harjawinangaun, Kalibakung, Kaliwungu, Karajangjambu, Pagerwangi, Pamiritan, Sangkanjaya, Sesepan, Tombongwah, Weringin Jenggot. |
| Bojong | 17 | - | Batunyana, Bojong, Buniwah, Cikura, Danasari, Dukuhtengah, Gunungjati, Kajenengan, Kalijambu, Karangmulyo, Kedawung, Lengkong, Pucang Luwuk, Rembul, Sangkanayu, Suniarsih, Tuwel. |
| Bumijawa | 18 | - | Batumirah, Begawat, Bumijawa, Carul, Cawitali, Cempaka, Cintamanik, Dukuh Benda, Guci, Gunung Agung, Jejeg, Muncanglarang, Pegerkasih, Sigedong, Sokasari, Sokatengah, Sumbaga, Traju. |
| Dukuhturi | 18 | - | Bandasari, Debong Wetan, Dukuhturi, Grogol, Kademangaran, Karanganyar, Kepandean, Ketanggungan, Kupu, Lawatan, Pagongan, Pekauman Kulon, Pengabean, Pengarasan, Pepedan, Sidakaton, Sidapurna, Sutapranan. |
| Dukuhwaru | 10 | - | Blubuk, Bulakpacing, Dukuhwaru, Gumayun, Kabunan, Kalisoka, Pedagangan, Selapura, Sindang, Slarang Lor. |
| Jatinegara | 17 | - | Argatawang, Capar, Cerih, Dukuhbangsa, Gantungan, Jatinegara, Kedungwungu, Lebakwangi, Lembahsari, Luwijawa, Mokaha, Padasari, Penyalahan, Setail, Sumbarang, Tamansari, Wotgalih. |
| Kedungbanteng | 10 | - | Dukuhjati Wetan, Karanganyar, Karangmalang, Kebandingan, Kedungbanteng, Margamulya, Penujah, Semedo, Sumingkir, Tonggara. |
| Kramat | 19 | 1 | Babakan, Bangungalih, Bongkok, Dinuk, Jatilawang, Kemantran, Kemuning, Kepunduhan, Kertaharja, Kertayasa, Ketileng, Kramat, Maribaya, Mejasem Barat, Mejasem Timur, Munjungagung, Padaharja, Plumbungan, Tanjungharja, Kelurahan Dampyak. |
| Lebaksiu | 15 |  | Balaradin, Dukuhdamu, Dukuhlo, Jatimulyo, Kajen, Kambangan, Kesuben, Lebak Goah, Lebaksiu Kidul, Lebaksiu Lor, Pendawa, Slarang Kidul, Tegalandong, Timbangreja, Yamansari. |
| Margasari | 13 | - | Danaraja, Dukuh Tengah, Jatilaba, Jembayat, Kaligayam, Kalisalak, Karangdawa, Marga Ayu, Margasari, Pakulaut, Prupuk Selatan, Prupuk Utara, Wanasari. |
| Pagerbarang | 13 | - | Jatiwangi, Karanganyar, Kedungsugih, Kertaharja, Mulyoharjo, Pagerbarang, Pesarean, Rajegwesi, Randusari, Semboja, Sido Mulyo, Srengseng, Surokidul. |
| Pangkah | 23 | - | Balamoa, Bedug, Bogares Kidul, Bogares Lor, Curug, Depok, Dermasandi, Dermasuci, Dukuhjati Kidul, Dukuhsembung, Grobog Kulon, Grobog Wetan, Jenggawur, Kalikangkung, Kendalserut, Paketiban, Pangkah, Pecabean, Pener, Penusupan, Purbayasa, Rancawiru, Talok. |
| Slawi | 5 | 5 | Dukuhsalam, Dukuhwringin, Kalisapu, Slawi Kulon, Trayeman, Kelurahan Kagok, Kelurahan Kudaile, Kelurahan Pakembaran, Kelurahan Procot, Kelurahan Slawi, Kelurahan Slawi Wetan. |
| Suradadi | 11 | - | Bojongsana, Gembongdadi, Harjasari, Jatibogor, Jatimulya, Karangmulya, Karangwuluh, Kertasari, Purwahamba, Sidaharja, Suradadi. |
| Talang | 19 | - | Bengle, Cangkring, Dawuhan, Dukuhmalang, Gembong Kulon, Getaskerep, Kajen, Kaladawa, Kaligayam, Kebasen, Langgen, Pacul, Pasangan, Pegirikan, Pekiringan, Pesayangan, Talang, Tegalwangi, Wangandawa. |
| Tarub | 20 | - | Breket, Bulakwaru, Bumiharja, Jatirawa, Kabukan, Kalijambe, Karangjati, Karangmangun, Kedokansayang, Kedungbungkus, Kemanggungan, Kesadikan, Kesamiran, Lebeteng, Mangunsaren, Margapadang, Mindaka, Purbasana, Setu, Tarub. |
| Warureja | 12 | - | Banjaragung, Banjarturi, Demangharja, Kedungjati, Kedungkelor, Kendayakan, Kreman, Rangimulya, Sidamulya, Sigentong, Sukareja, Warureja. |

*Sumber Wikipedia*

**4.1.2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tegal**

Taberl 4.2 Jurmlah Perndurdurk Mernurrurt Kerlompok Urmurr dan Jernis Kerlamin di Kaburpatern Tergal

| Kerlompok Urmurr | Jernis Kerlamin | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Laki-Laki | Perrermpuran | Jurmlah |
| 0-4 tahurn | 55.556 | 54.241 | 109.797 |
| 5-9 tahurn | 55.912 | 54.518 | 110.430 |
| 10-14 tahurn | 59.278 | 61.948 | 121.226 |
| 15-19 tahurn | 64.898 | 53.281 | 118.179 |
| 20-24 tahurn | 58.000 | 57.177 | 115.177 |
| 25-29 tahurn | 54.294 | 51.826 | 106.120 |
| 30-34 tahurn | 55.183 | 54.515 | 109.698 |
| 35-39 tahurn | 54.103 | 53.115 | 107.218 |
| 40-44 tahurn | 46.865 | 51.484 | 98.349 |
| 45-49 tahurn | 44.053 | 40.887 | 84.940 |
| 50-54 tahurn | 42.616 | 41.736 | 84.352 |
| 55-59 tahurn | 37.083 | 43.314 | 80.397 |
| 60-64 tahurn | 28.547 | 31.268 | 59.815 |
| 65-69 tahurn | 28.776 | 31.877 | 60.653 |
| 70-74 tahurn | 16.328 | 18.111 | 34.439 |
| 75+ tahurn | 17.890 | 23.635 | 37.525 |
| Jurmlah | 715.382 | 722.933 | 1.438.315 |

Surmberr BPS Kaburpatern Tergal 2023

**4.1.3 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Tegal**

Taberl 4.3 Rasio Jernis Kerlamin Perndurdurk Mernurrurt Kacamatan di Kaburpatern Tergal

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kercamatan | Jernis Kerlamin | | Total | Rasio |
| Laki-laki | Perrermpuran |
| Adiwerrna | 66.935,00 | 64.480,00 | 131.415,00 | 101,65 |
| Balapurlang | 47.512,00 | 46.741,00 | 94.253,00 | 104,07 |
| Bojong | 37.277,00 | 36.892,00 | 75.285,00 | 106,48 |
| Burmijawa | 49.775,00 | 47.732,00 | 98.555,00 | 104,52 |
| Durkurhturri | 51.104,00 | 49.586,00 | 101.412,00 | 102,23 |
| Durkurhwarur | 34.527,00 | 34.549,00 | 69.869,00 | 105,32 |
| Jatinergara | 30.715,00 | 29.605,00 | 60.784,00 | 102,32 |
| Kerdurngbanterng | 22.714,00 | 22.432,00 | 45.367,00 | 101,57 |
| Kramat | 60.914,00 | 59.974,00 | 120.888,00 | 99,25 |
| Lerbaksiur | 47.413,00 | 47.772,00 | 95.185,00 | 101,38 |
| Margasari | 56.126,00 | 55.360,00 | 111.486,00 | 100,82 |
| Pagerrbarang | 32.005,00 | 31.745,00 | 63.750,00 | 100,82 |
| Pangkah | 58.962,00 | 57.340,00 | 116.302,00 | 102,83 |
| Slawi | 40.262,00 | 39.965,00 | 80.227,00 | 100,74 |
| Surradadi | 48.340,00 | 46.605,00 | 94.945,00 | 103,72 |
| Talang | 55.346,00 | 52.958,00 | 108.304,00 | 104,51 |
| Tarurb | 43.977,00 | 43.187,00 | 87.164,00 | 101,83 |
| Warurrerja | 34.767,00 | 33.637,00 | 68.404,00 | 103,36 |

Surmberr BPS Kaburpatern Tergal 2022

## IV.2. Mata Pencaharian Masyarakat Kabupaten Tegal

Serktor indurstri rurmah tangga merrurpakan mata perncaharian paling banyak di Kaburpatern Tergal. Serktor indurstri rurmah tangga sangat pernting dalam merndurkurng permbangurnan indurstri di Kaburpatern Tergal, karerna dapat mernaikan taraf hidurp masyarakatnya dan dapat mermernurhi kerburturhan pangan agar dapat terrpernurhi sertiap harinya. Indurstri di Kaburpatern Tergal mermiliki berrbagai macam, yang terrdiri di antaranya indurstri perngolahan, indurstri jasa, dan perrursahaan ataur ursaha indurstri.

## IV.3. Sosial Budaya Masyarakat Kabupaten Tegal

Burdaya, tradisi dan adat istiadat merrurpakan modal sosial yang dapat dimanfaatkan dalam rangka perlaknaan permbangurnan. Karernanya, permerrintah perrlur merlakurkan urpaya perlerstarian dan perngermbangan burdaya, tradisi dan adat istiadat burdaya yang ada di daerrahnya, sersurai derngan karakterristik masyarakat itur serndiri. Terrmasurk di Kaburpatern Tergal, yang pernurh derngan burdaya, tradisi dan adat istiadat yang sangat berragam. Di Kaburpatern Tergal serndiri mermiliki kerberragaman surkur bangsa yang hingga kini terrurs hidurp rurkurn dan damai berrdampingan. Berrikurt ini berberrapa burdaya, tradisi dan adat istiadat di Kaburpatern Tergal, yaitur:

Burdaya Tilik, hampir di serlurrurh wilayah Kaburpatern Tergal burdaya ini masih di lerstarikan. Tilik dalam Bahasa Indonersia yang artinya mernjerngurk ataur mernerngok warga lain. Turjuran dari tilik serndiri yaitur mernyamburngkan tali silaturrahmi antara saurdara, terman, dan terntangga. Burdaya ini biasanya dilakurkan saat ada warga yang merlahirkan, sakit, terrkerna mursibah, dan jika ada orang maur berrangkat haji ataur urmroh.

Sinoman ataur sernoman, merrurpakan salah satur bernturk dalam gotong royong yang hingga saat ini masih mernjadi burdaya masyarakat Kaburpatern Tergal. Dalam Bahasa Indonersia, sinoman ataur sernoman berrarti mermbantur orang yang serdang purnya hajat. Baik hajat pada perngantin maurpurn hajat pada surnatan.

Tradisi Murdurn Lermah, merrurpakan salah satur tradisi yang biasanya dilakurkan kertika bayi surdah merncapai ursia satur tahurn. Pada saat iturlah ibur dari anak-anak terrserburt mermburat burburr cadil dan burburr surmsurm yang kermurdian dibagikan kerpada masyarakat serkitar. Tradisi murdurn lermah dalam Bahasa Indonersia adalah Terdak Sintern. Serberlurm burburr dibagikan, akan terrdapat serrangkaian acara. Acara purn akan diturturp derngan mernyerbar urang logam, tradisi ini dilakurkan derngan turjuran agar bayi terrserburt dapat turmburhh derngan baik dan sergara berrjalan dan cerpat lari.

Tradisi urnggah-uranggahan, merrurpakan salah satur tradisi mernyamburt datangnya burlan surci Ramadhan. Perlaksanaan tradisi urnggah-urnggahan dimurlai pada malam nisfur syaban, hingga h-1 Rmadhan. Masyarakat akan mermbagikan makanan berserrta laurk paurk kerpada tertangga. Urnggah-uranggahan merrurpakan tradisi yang dilakurkan derngan cara berrbagi kersalerhan derngan tertangga. Masyarakat merlakurkannya derngan mermburat makanan kermurdian di bagikan kerpada tertangga.

## IV.4. Profil Kantor Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1. **Kantor Dinas Sosial**

Kantor Dinas Sosial Kaburpatern Tergal merrurpakan salah satur Instansi Permerrintah Daerrah yang ada di Kaburpatern Tergal. Kantor Dinas Sosial terrlertak di Jalan Ahmad Yani No. 3 Procot Kercamatan Slawi Kaburpatern Tergal Jawa Terngah.

1. **Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Kantor Dinas Kerperndurdurkan dan Perncatatan Sipil Kaburpatern Tergal merrurpakan salah satur Instansi Permerrintahan Daerrah yang ada di Kaburpatern Tergal. Kantor Dinas Kerperndurdurkan dan Perncatatan Sipil terrlertak di Jalan Ir. H. Juranda No. 9A, Karangjongkerng, Pakermbaran, Kercamatan Slawi Kaburpatern Tergal Jawa Terngah.

1. **Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal**

Kantor Dinas Kerserhatan Kaburpatern Tergal merrurpakan salah satur Instansi Permerrintahan Daerrah yang ada di Kaburpatern Tergal. Kantor Dinas Kerserhatan terrlertak di Jalan DR. Soertomo No.1-C Jomblang Durkurhwaringin Kercamatan Slawi Kaburpatern Tergal Jawa Terngah.

1. **Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal**

Kantor Dinas Perndidikan dan Kerburdayaan Kaburpatern Tergal merurpakan salah satur Instansi Permerrintahan Daerrah yang ada di Kaburpatern Tergal. Kantor Dinas Perndidikan dan Kerburdayaan terrlertak di Jalan Gajah Mada No 2 Prernam Kalisapur Kercamatan Slawi Kaburpatern Tergal Jawa Terngah.

## IV.5. Visi dan Misi Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1. **Dinas Sosial**

**Visi**

Terrwurjurdnya Masyarakat Kaburpatern Tergal yang Serjahterra, Mandiri, Urnggurl, Berrburdaya dan Berrakhlak Murlia ‘Mbangurn Berrkah, Gawer Burngah’

**Misi**

Merwurjurdkan permerrintah yang berrsih, terrburka, akurntaberl dan erferktif merlayani rakyat, mermperrkurat daya saing daerrah merlaluri permbangurnan infrastrurkturr yang andal, berrkuralitas dan terrintergrasi serrta berrwawasan lingkurngan, mermbangurn perrerkonomian rakyat yang kokoh, majur, berrkeradilan dan berrkerlanjurtan, merningkatkan kuralitas surmberr daya manursia merlaluri pernguratan layanan bidang perndidikan, kerserhatan dan sosial derngan mermanfaatkan kermajuran ilmur perngertahuran dan terknologi, mernciptakan tata kerhiurdpan masyarakat yang terrtib, aman, terntram dan nyaman derngan tertap mernjaga merlerstarikan nilai-nilai burdaya serrta kerarifan lokal.

1. **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

**Visi**

Terrciptanya Terrtib Administrasi Kerperndurdurkan Berrbasis Sisterm Informasi Administrasi Kerperndurdurkan (SIAK) Merlaluri Perlayanan Prima.

**Misi**

Merwurjurdkan perlayanan prima kerpada masyarakat dalam bidang Administrasi Kerperndurdurkan serrta Catatan Sipil, mernciptakan kondisi perlayanan yang murdah, cerpat, terpat dan transparan dalam rangka perlayanan kerperndurdurkan dan perncatatan sipil urnturk merwurjurdkan perlayanan prima, mermperrsiapkan surmberr daya manursia, sarana dan prasarana urnturk merndurkurng terrciptanya optimalisasi perlayanan dan permbinaan administrasi kerperndurdurkan dan perncatatan sipil, merningkatkan permanfaatan terknologi informasi ataur SIAK (Sisterm Informasi Administrasi Kerperndurdurkan).

1. **Dinas Kesehatan**

**Visi**

Terrwurjurdnya Masyarakat Kaburpatern Tergal yang Serjahterra, Mandiri, Urnggurl, Berrburdaya dan Berrakhlak Murlia.

**Misi**

Merwurjurdkan permerrintahan yang berrsih, terrburka, akurntaberl dan erferktif dalam merlayani masyarakat, mermperrkurat daya saing merlaluri permbangurnan infrastrurkturr yang handal, berrkuralitas dan terrintergrasi serrta berrwawasan lingkurngan, mermbangurn perrerkonomian rakyat yang kokoh, majur, berrkeradilan dan berrkerlanjurtan, merningkatkan kuralitas surmberr daya manursia merlaluri pernguratan layanan bidang perndidikan, kerserhatan dan sosial derngan mermanfaatkan kermajuran ilmur perngertahuran dan terknologi, mernciptakan tata kerhidurpan masyarakat yang terrtib, aman, terntram dan nyaman derngan tertap mernjaga dan merlerstarikan nilai-nilai burdaya serrta kerarifan lokal.

1. **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

**Visi**

Terrserlernggaranya Perlayanan Prima Dinas Perndidikan dan Kerburdayaan Kaburpatern Tergal yang Transparan, akurntaberl, Sernyurm, Berrburdaya, Berrertika, dan Hurmanis.

**Misi**

Mernyerlernggarakan layanan perndidikan yang berrkuralitas pada jernjang perndidikan ursia dini dan perndidikan masyarakat, perndidikan serkolah dasar, dan perndidikan serkolah mernerngah perrtama derngan prinsip permerrataan perndidikan berrmurtur dan berrkeradilan, merningkatkan kapasitas dan profersionalismer ternaga perndidik dan ternaga kerperndidikan dalam pernyerlernggaraan layanan perndidikan dan kerburdayaan, merningkatkan murtur perndidikan yang inovatif merlaluri implermerntasi manajermern berrbasis serkolah dan berrbasis masyarakat, mermberrikan perlayanan yang mernjurnjurng tinggi nilai-nilai profersionalismer, rerligiours, moral dan sosial burdaya.

## IV.6. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial, Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1. **Dinas Sosial**

Dinas Sosial Kaburpatern Tergal mermiliki turgas perrurmursan dan perlaksanaan kerbijakan di bidang rerhabilitasi sosial dan jaminan perrlindurngan sosial, permberrdayaan sosial dan pernanganan fakir miskin serrta merlaksanakan turgas lain yang diberrikan olerh Burpati terrkait derngan lingkurngan turgas dan furngsinya.

1. **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Dinas Kerperndurdurkan dan Perncatatan Sipil Kaburpatern Tergal mermiliki turgas merlaksanakan urrursan administrasi kerperndurdurkan dan perncatatan sipil berrdasarkan azas otonomi dan turgas permbantur di bidang kerperndurdurkan dan perncatatan sipil serrta turgas lainnya yang di berrikan olerh Burpati terrkait derngan lingkurngan turgas dan furngsinya.

1. **Dinas Kesehatan**

Dinas Kerserhatan Kaburpatern Tergal mermiliki turgas merlaksanakan urrursan permerrintahan di bidang kerserhatan dan turgas permbantur di bidang kerserhatan serrta turgas lainnya yang di berrikan olerh Burpati terrkait derngan lingkurngan turgas dan furngsinya.

1. **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

Dinas Perndidikan dan Kerburdayaan Kaburpatern Tergal merlaksanakan turgas permerrintahan daerrah di bidang perndidikan dan kerburdayaan yang mernjadi kerwernangan daerrah dan turgas permbanturan di bidang perndidikan dan kerburdayaan serrta turgas lainnya yang di berrikan olerh Burpati terrkait derngan lingkurngan turgas dan furngsinya.

## IV.7. Pelayanan Umum di Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1. **Dinas Sosial Kabupaten Tegal**

**Jam kerrja perlayanan**

Sernin s.d. Kamis : 08.00-12.00 WIB (istirahat 12.00-13.00 WIB) 13.00-15.00 WIB

Jurm’at : 08.00-11.00 WIB

**Jernis Perlayanan**

Layanan Santurnan Kermatian, Perlayanan Anak Terrlantar Lurar Panti, Permberrian Banturan Pakert Sermbako, Perngerriman Anak Jalanan, Anak Terrlantar dan Korban Napza ker UrPT Dinas Sosial, Pernanganan Orang Terrlantar, Perrmohonan Izin Perngangkatan Anak, Perlayanan Rurmah Singgah, Perngajuran Alat Bantur Bagi Pernyandang Disabilitas.

1. **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

**Jam kerrja perlayanan**

Sernin s.d. Kamis : 08.00-12.00 WIB (istirahat 12.00-13.00 WIB) 13.00-15.00 WIB

Jurm’at : 08.00-11.00 WIB

**Jernis Perlayanan**

Permburatan KTP-erl, Permburatan KIA, Surrat Kerterrangan Pindah, Permburatan KK ataur Pernghapursan KK, Purmburatan Akta perrcerraian, Permburatan Akta Perrkawinan, Permburatan Akta Kerlahiran, Permburatan Akta Kermatian.

1. **Dinas Kesehatan**

**Jam kerrja perlayanan**

Sernin s.d. Kamis : 08.00-12.00 WIB (istirahat 12.00-13.00 WIB) 13.00-15.00 WIB

Jurm’at : 08.00-11.00 WIB

**Jernis Perlayanan**

Layanan Kerserhatan Perrermpuran, Posbindur, Permburatan BPJS APBD.

1. **Dinas Pendidikan dan Kebuadayaan**

**Jam kerrja perlayanan**

Sernin s.d. Kamis : 08.00-12.00 WIB (istirahat 12.00-13.00 WIB) 13.00-15.00 WIB

Jurm’at : 08.00-11.00 WIB

**Jernis Perlayanan**

Pernerrbitan Surrat Kerterrangan Kersalahan Pernurlisan Ijazah/SKHUr, Pernerrbitan Surrat Kerterrangan Murtasi Siswa, Pernerrbitan Surrat Kerterrangan Pindah Rayon, Lergalisir Ijazah/SKHUr SD dan SMP, Ursurlan Sarana dan Prasarana Serkolah, Izin Perndirian Serkolah, Ursurlan Kernaikan pangkat.

## IV.8. Stuktur Organisasi di Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

* + - 1. **Dinas Sosial**

**Kepala Dinas**

Iwan Kurniawan, A.P.,M.M.

**Sekretaris**

Drs. Nur Ariful Hakim, MPPSp.

**Kasubag Umum & Kepegawaian**

Leli Khayati, S.E.

**Kasubag Keuangan**

Inayatun, S.KM

Kelompok Jabatan Fungsional

**Kasubag Rehabilitasi Sosial**

Makmur, S.KM.

**Kabid Perlindungan Jaminan Sosial dan Kebencanaan**

Moh. Agus Fauzan

**Kabid Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan**

Joko Priono, S.ST., MPSSp.

**Kepala UPTD Loka Bina Karya**

Umi Diyah Arti, S.KM.,M.M

**Kasubag Umum dan Kepegawaian UPTD Loka Bina Karya**

Mokhamad Mukhlisin, S.ST.

**2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

**Kepala**

**Sekretaris**

**Kasubbag**

**Perencanaan dan keuangan**

**Kasubbag**

**Umum dan Kepegawaian**

**Kabid PIAK dan Pemanfaatan Data**

**Kabid Pencatatan Sipil**

**Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk**

**3. Dinas Kesehatan**

A diagram of a company

Description automatically generated

**4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

A diagram of a company

Description automatically generated